

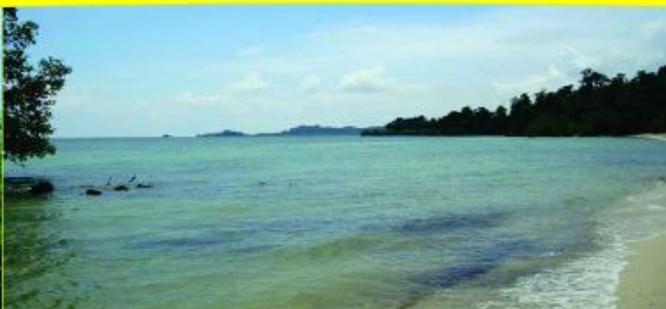
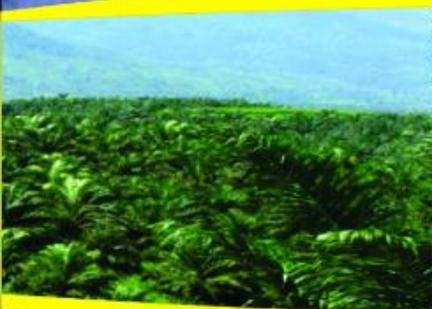
TANAH LAUT



# LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KABUPATEN (RPIK)



*Kerjasama*

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian  
KABUPATEN TANAH LAUT

*Dengan*

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

2017

## LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Usulan : Kajian Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah, dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Tanah Laut

2. Ketua

- a. Nama lengkap : Dr. H. Hairudinor, S.Sos, MM
- b. Jabatan Struktural : Pembina Tk I/ IVa
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Unit kerja : Fakultas FISIP Universitas Lambung Mangkurat
- e. Alamat surat : Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kotak Pos 87 Banjarmasin
- f. Telpon/Faks : 0511-3308021
- g. E-mail : [hairudin.fisipulm@gmail.com](mailto:hairudin.fisipulm@gmail.com)

3. Anggota peneliti

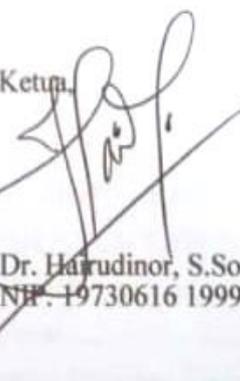
No.	Nama dan Gelar	Keahlian	Institusi
1.	Dr. Abdul Halim Barkatullah, SH.,M.Hum	Ilmu Hukum	Universitas Lambung Mangkurat
2.	Lies Ariany.,SH.,MH	Ilmu Hukum	Universitas Lambung Mangkurat
3.	Kausar Nasir, S.IP	Ilmu Pemerintahan	Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin, Agustus 2017

Mengetahui,  
An. Ketua LPPM Unlam,  
Sekretaris,

  
Dr. Abdul Halim Barkatullah, SH.,M.Hum  
NIP. 19761109 200604 1 003

Ketua,

  
Dr. Hairudinor, S.Sos.,MM  
NIP. 19730616 199903 1 003



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI INDUSTRI DAERAH.....</b>	<b>6</b>
2.1 Penyusunan RPIK Kabupaten Tanah Laut .....	6
2.2 Kondisi Umum Wilayah .....	8
2.2.1 Penduduk Kabupaten Tanah Laut.....	9
2.2.2 Kondisi Ekonomi Daerah .....	11
2.2.3 Sektor Unggulan di Kabupaten Tanah Laut.....	17
2.2.4 Infrastruktur Dasar dan Penataan Wilayah.....	19
2.2.5 Pelabuhan Laut .....	22
2.2.6 Telekomunikasi.....	23
2.2.7 Listrik, dan Air Bersih.....	24
2.2.8 Penataan Wilayah.....	26
2.3 Kondisi Industri Secara Umum .....	36
2.4 Sumber Daya Industri .....	39
2.5 Analisis Potensi Unggulan .....	51
<b>BAB III VISI, MISI SERTA TUJUAN DAN SASARAN SASARAN</b>	
<b>PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TANAH LAUT .....</b>	<b>61</b>
3.1 Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Tanah Laut .....	61
3.2 Visi Pembangunan Industri Nasional.....	65
3.3 Visi dan Misi Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan...	67
3.4 Tujuan Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan.....	68
3.5 Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan.....	68
3.6 Visi dan Misi RPJM Daerah Kabupaten Tanah Laut 2013-2018.....	71
3.6.1 Visi dan Misi RPJMD .....	71
3.7 Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Laut...76	
3.7.1 Perumusan Visi.....	76
3.7.2 Misi Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Laut.....	77
3.8 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Industri Kabupaten Tanah Laut.....	79
3.8.1 Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Laut.....	79



3.8.2 Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Laut.....80

**BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI****Error! Bookmark not**

4.1 Strategi Pembangunan Industri ..... **Error! Bookmark not defined.**

4.1.1 Strategi Pembangunan Industri..... **Error! Bookmark not defined.**

4.1.2 Strategi Pengembangan Sentra Industri**Error! Bookmark not defined.**

4.1.3 Strategi Pengembangan Kawasan Industri Kecil..... **Error! Bookmark not defined.**

4.2 Program Pembangunan Industri ..... **Error! Bookmark not defined.**

4.3 Industri Unggulan Kabupaten Tanah Laut yang dapat dikembangkan ..... **Error! Bookmark not defined.**

4.3.1 Program Pembangunan Industri Hulu Agro**Error! Bookmark not defined.**

4.3.2 Program Pembangunan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi.. **Error! Bookmark not defined.**

**BAB V PENUTUP**.....**Error! Bookmark not defined.**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 - 2037.....	69
Tabel 3.2	Keterkaitan Visi Pembangunan Industri Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tanah Laut .....	77
Tabel 3.3	Sinkronisasi Rancangan Misi Kabupaten Tanah Laut Dengan Misi Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan .....	78
Tabel 3.4	Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 - 2037 .....	80
Tabel 4.1.	Faktor-faktor yang Menentukan Industri Unggulan	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.2.	Potensi Industri Unggulan Kabupaten Tanah Laut	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.3	Industri Unggulan Kabupaten Tanah Laut yang dapat dikembangkan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.4.	Potensi Industri di Kabupaten Tanah Laut	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.5	Program Pengembangan Industri Hulu Agro Tahun 2017 - 2037..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.6	Program Pengembangan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.7	Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2017 - 2037 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.8	Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2017 - 2037 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.8	Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tahun 2017 - 2037.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.9	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tahun 2017 - 2037 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.10	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Tahun 2017 - 2037 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.11	Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Tahun 2017 - 2037.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.12	Program Pengelolaan Lingkungan Tahun 2017 - 2037	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.13	Program Pengadaan Lahan Industri Tahun 2017 - 2037.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.14	Program Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan Tahun 2017 - 2037 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.15	Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2017 - 2037 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



- Tabel 4.16 Program Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Tahun 2017 - 2037  
..... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4.17 Program Pengembangan Jaringan Sanitasi Tahun 2017 - 2037 ..... **Error!**  
**Bookmark not defined.**
- Tabel 4.18 Program Pengembangan Jaringan Transportasi Tahun 2017 - 2037  
..... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4.19 Program Pemberdayaan Industri Tahun 2017 - 2037 **Error! Bookmark**  
**not defined.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Kondisi perekonomian nasional yang masih dalam masa perbaikan (*recovery*) belakangan ini, menunjukkan perlunya dilakukan penataan kembali secara menyeluruh terhadap semua aspek kehidupan perekonomian, baik ditingkat nasional, sektoral, maupun regional. Disamping itu penataan perekonomian nasional juga perlu dilakukan dalam rangka memasuki era pasar bebas (dimana persaingan antar negara sudah semakin ketat). Dalam mengatasi situasi perekonomian yang kurang menguntungkan serta dalam rangka menghadapi persaingan yang semakin ketat tersebut, maka peranan perencanaan sebagai tahap awal dari rangkaian kegiatan pembangunan menjadi sangat penting. Kesalahan dalam perencanaan pembangunan, tidak hanya berakibat pada ketidakberhasilan tujuan pembangunan, melainkan juga berakibat pada pemborosan penggunaan sumberdaya yang semakin langka. Strategi yang ditempuh untuk pertumbuhan ekonomi adalah dengan jalan industrialisasi

Undang-undang No.03 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mendefinisikan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan / atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 lebih menekankan lagi pentingnya penataan sektor industri masing-masing wilayah, untuk tingkat nasional dikenal dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), tingkat provinsi disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan pada wilayah kabupaten disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).

Kabupaten Tanah Laut merupakan kabupaten yang terletak paling selatan dari Propinsi Kalimantan Selatan dengan ibukota

Pelaihari. Secara geografis, Kabupaten Tanah Laut terletak di antara 114° 30' 22" - 115° 10' 30" BT dan 30° 30' 3" - 4° 10' 30" LS, dengan luas wilayah 3.631,35 Km<sup>2</sup> atau selitar 9,71 persen dari total luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, posisi Tanah Laut sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Banjarmasin (ibukota propinsi) dan Laut Jawa, serta memiliki pantai dan pelabuhan sebagai jalur distribusi barang dari dan ke luar daerah.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

Utara : Kota Banjarbaru  
Selatan : Laut Jawa  
Timur : Kabupaten Tanah Bumbu  
Barat : Laut Jawa

Keadaan wilayahnya terdiri dari dataran tinggi dan bergunung-gunung, dataran rendah, serta pantai dan rawa. Jenis tanahnya sangat beragam yaitu latosol (29,17 %), podsolik (32,98 %), alluvial (32,26 %) dan organosol (5,59 %). Dari segi pemanfaatannya, lahan tersebut terdiri dari pemukiman, persawahan, tegalan, kebun campuran, perkebunan, alang-alang/semak dan hutan.

Temperatur udara maksimum di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2008 34,0° C sampai 325,0° C, temperatur minimum berkisar antara 20,1° C sampai 22,2° C dan rata-rata temperatur udara tiap bulan berkisar antara 26,0° C sampai 27,3° C.

Dengan rata-rata kelembapan udara tiap bulan berkisar antara 80 persen sampai 83 persen. Untuk keadaan curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember sebesar 731,0 mm.

Untuk keadaan kecepatan angin, terbesar terjadi pada bulan Juli dan Agustus yang mencapai 3,9 knots dan terendah terjadi pada bulan Nopember yakni sekitar 2,2 knots.

Sedangkan keadaan penyinaran matahari secara rata-rata selama setahun sebesar 26 persen, dengan penyinaran terbanyak terjadi pada bulan Juni sebesar 40,3 persen dan terendah pada bulan Januari sekitar 9,3 persen.

Pembangunan infrastruktur pertanian menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Infrastruktur pertanian yang dibangun pada tahun 2010 diantaranya pembangunan jalan usaha tani (JUT) yang tersebar di beberapa kecamatan sepanjang 19.079 meter, pembangunan jalan produksi pangan sepanjang 3.672 meter, dan jalan produksi perkebunan 5.310 meter.<sup>1</sup>

Pentingnya pengembangan dan pembangunan kawasan industri di Kabupaten Kabupaten Tanah Laut mengingat daya dukung dari sumber daya yang tersedia (alam dan manusia) cukup tinggi, meskipun hal ini masih sebatas nilai kuantitatif bukan pada kualitasnya. Namun apabila sumber daya ini dapat dipergunakan dengan tepat akan menghasilkan kekuatan-kekuatan pada industri yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu masyarakat yang mengalami kemajuan dalam pembangunan ekonominya.

Suatu masyarakat yang pembangunan ekonominya berhasil ditandai dengan tingginya pendapatan perkapita masyarakat negara tersebut. Dengan tingginya pendapatan perkapita masyarakat, maka negara dan masyarakat akan dapat lebih leluasa dalam menjalankan berbagai aktivitas pada berbagai bidang yang lain. Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan. Peranan Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi Nasional dapat ditelusuri dari kontribusi masing-masing subsektor terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional atau terhadap produk domestik bruto.

Pada beberapa negara yang tergolong maju, peranan sektor industri lebih dominan dibandingkan dengan sektor pertanian. Sektor industri memegang peran kunci sebagai mesin pembangunan karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sektor lain karena nilai kapitalisasi

---

<sup>1</sup> <https://tanahlautkab.go.id/?q=node/66> diakses tanggal 7 November 2016.

modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, juga kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Pada negara-negara berkembang, peranan sektor industri juga menunjukkan kontribusi yang semakin tinggi. Kontribusi yang semakin tinggi dari sektor industri menyebabkan perubahan struktur perekonomian negara yang bersangkutan secara perlahan ataupun cepat dari sektor pertanian ke sektor industri. Peranan sektor industri dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara sangat penting karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dalam hal akselerasi pembangunan. Keunggulan-keunggulan sektor industri tersebut diantaranya memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah (*value added*) yang lebih tinggi pada berbagai komoditas yang dihasilkan.

Potensi-potensi pengembangan industri sebagaimana yang diuraikan di atas apabila mampu dikembangkan di wilayah Kabupaten juga akan mendukung kemajuan dari pembangunan ekonomi masyarakatnya, karena apabila pilar-pilar pembangunan ekonomi disandarkan pada pembangunan industri hal ini lebih berpotensi lebih cepat dalam mencapai kemajuan dibandingkan menyandarkan pembangunan ekonomi pada sektor lain, hal ini didukung dengan kemajuan teknologi saat ini yang lebih memberikan banyak *value* pada pengembangan industri.

Namun demikian pembangunan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada pembangunan industri tidaklah dapat dicapai dengan mudah apabila sumber-sumber pendukungnya (alam, manusia, infrastruktur) masih jauh dari memadai. Sumber daya alam yang begitu besar tersedia tidak dapat dilakukan industrialisasi karena cara pengolahannya selama ini jauh dari prinsip efektif dan efisien. Sumber daya manusia yang tersedia bukanlah individu-individu yang kreatif dalam menyelesaikan pekerjaan, mudah menyerah, motivasi yang lemah, berpikir pragmatis, kemampuan dan kompetensi yang lemah dan masih banyak kelemahan lainnya dikarenakan sebagian masih berpikir

untuk mengandalkan harapan hidupnya dengan ketersediaan sumber daya alam yang dalam hal ini makin terbatas ketersediaannya. Infrastruktur yang jauh dari memadai karena kelemahan kebijakan dan pengawasan para pengambil keputusan, daya dukung aparat untuk bekerja secara profesional juga menjadi masalah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas dari infrastruktu.

Beberapa masalah tersebut di atas merupakan persoalan-persoalan yang harus dicarikan solusinya guna mewujudkan kemajuan pembangunan ekonomi dengan meningkatkan potensi-potensi pada sektor industri, yang pada akhirnya adalah usaha ini adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan perkapita yang tinggi guna mewujudkan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat wilayah.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan RPIK Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, adalah :

1. Undang-undang No. 03 tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 11 ayat (1) setiap Bupati/ Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
2. Undang-undang NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 24 ayat (1).
3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI INDUSTRI DAERAH**

#### **2.1 Penyusunan RPIK Kabupaten Tanah Laut**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 10 menyebutkan bahwa setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP). Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang dibuat harus mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). Selanjutnya Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan evaluasinya dilakukan oleh Pemerintah, dan di Kabupaten menyusun RPIK dan diundangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Laut disusun paling sedikit dengan memperhatikan: (1) Potensi sumber daya industri daerah, (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan (3) Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan social ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Selanjutnya pada Pasal 11 UU Perindustrian, menyebutkan bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK). Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). Rencana itu selanjutnya ditetapkan melalui

Peraturan Daerah Kab/Kota setelah dievaluasi oleh Gubernur. Kesenjangan dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

RPIK/K merupakan prioritas dari Walikota/Bupati di bidang pembangunan industri yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) kabupaten/kota terkait melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD. Rancangan RPIK/K disusun oleh Bupati/Walikota, sedangkan rancangan Renstra-SKPD disusun oleh pimpinan masing-masing SKPD Kabupaten/kota. Rancangan RPIK/K ditelaah oleh Gubernur untuk melihat konsistensi RPIK/K dengan RPIP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian untuk menelaah konsistensi RPIK/K dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.

Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020 mengacu pada dari Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional 2015-2019 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”.

Sesuai dengan potensi sumberdaya alam provinsi Kalimantan Selatan, industri yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah adalah industri logam dasar, industri hulu agro dan industri pangan yang merupakan komoditi utama daerah.



terjadi di bulan September 2015 dan suhu terendah 21,10°C terjadi pada bulan Oktober 2015. Sebagai daerah tropis, kelembaban udara di Kabupaten Tanah Laut relatif tinggi dengan rata-rata 79,7 persen. Kelembaban maksimum terjadi di bulan Januari-Maret, sedangkan kelembaban minimum terjadi di bulan Oktober. Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim, topografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Rata-rata curah hujan selama tahun 2015 tercatat mencapai 199,6 mm, dengan jumlah terendah terjadi pada bulan Oktober (5,8 mm) dan tertinggi pada bulan Desember (579,0 mm).

Antara curah hujan dan keadaan angin/kecepatan angin biasanya sangat erat hubungannya satu sama lain. Keadaan angin pada musim hujan biasanya lebih kencang. Pada tahun 2015 kecepatan angin yang terjadi rata-rata sebesar 3,5 knots per bulan.

**Tabel 2.1**  
**Kondisi Geografis Kab. Tanah Laut**

Uraian	Satuan	2015
Luas	km <sup>2</sup>	3.631,35
Kecepatan Angin	knots	3,5
Kelembaban Udara	persen	79,7
Rata-rata suhu	°C	28,5
Curah Hujan	mm	199,6
Jumlah Hari Hujan	hari	12

*Sumber: Tanah Laut Dalam Angka, 2016*

### 2.2.1 Penduduk Kabupaten Tanah Laut

Kependudukan mempunyai peranan penting pada jalannya keberhasilan pembangunan. Masalah kependudukan seringkali menjadi fokus persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang terlalu banyak terkadang menjadi beban ekonomi pemerintah jika tidak ditangani dengan tepat. Hal ini karena berdampak terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan,

terutama ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan.

Penduduk Tanah Laut pada tahun 2015 berdasarkan hasil proyeksi penduduk berjumlah 324.283 jiwa, dimana sekitar 51 persennya adalah berjenis kelamin laki-laki. Bila dilihat dari sebaran penduduknya, Tanah Laut dengan luas wilayah sekitar 3.631,35 km<sup>2</sup> ditempati penduduk sebanyak 89 orang per km<sup>2</sup>.

Sementara komposisi penduduk bila dilihat dari segi kelompok umur, maka terdapat sekitar 66,56 persen yang berusia produktif antara 15–64 tahun dengan angka Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) sebesar 50,24 persen. Artinya rata-rata setiap 100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) ternyata menanggung penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 64 tahun keatas) sebanyak 50 orang.

Komposisi penduduk tidak hanya dapat dilihat dari segi umur, tetapi juga dari segi jenis kelamin. Di Tanah Laut, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Hal ini dapat ditunjukkan dari besaran *sex ratio* yang bernilai di atas 100. Pada tahun 2015, nilai *sex ratio* yang sebesar 105,56 berarti untuk setiap 100 perempuan terdapat 105 laki-laki.

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kependudukan Tanah Laut, 2013-2015**

Uraian	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Jumlah Penduduk (jiwa)</b>			
Laki-laki	160 895	163 784	166 526
Perempuan	152 830	155 314	157 757
Total	313 725	319 098	324 283
<b>Kepadatan Penduduk (jiwa/km<sup>2</sup>)</b>	86	88	89
<b>Rasio Jenis Kelamin (%)</b>	105,28	105,45	105,56
<b>Penduduk Menurut Kel. Umur (%)</b>			
0-14 thn	29,76	29,75	29,48
15-64 thn	66,44	66,45	66,56
≥ 65 thn	3,80	3,80	3,96

### **2.2.2 Kondisi Ekonomi Daerah**

Selama tahun 2015 kinerja perekonomian Kabupaten Tanah Laut menunjukkan fenomena ekonomi yang melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2014) yaitu dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,89 persen. Pertumbuhan pada tahun 2015 ini berada di bawah pertumbuhan tahun 2014 yang mencapai 3,05 persen.

Perubahan struktur ekonomi sering dijadikan sebagai salah satu sinyal untuk mengetahui ke arah mana pembangunan berlangsung dalam periode waktu tertentu. Kondisi tersebut disandarkan pada kekuatan efisiensi dan eksploitasi sumberdaya yang terjadi. Saat suatu kategori lapangan usaha yang mampu menciptakan efisiensi yang lebih tinggi, maka lapangan usaha tersebut akan tumbuh lebih cepat dalam memproduksi barang dan jasa dibandingkan dengan lapangan usaha lain yang belum mampu berkinerja secara efisien. Implikasinya, sektor yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat tersebut akan meningkatkan pangsa lapangan usahanya dan menyusutkan pangsa lapangan usaha lain dalam memproduksi barang dan jasa.

Pada saat kondisi tersebut terjadi, maka sebetulnya telah berjalan proses restrukturisasi/*rebalancing* dalam perekonomian wilayah. Pada umumnya, seiring pembangunan yang berlangsung, proses tersebut berjalan diawali dengan membesarnya pangsa kategori lapangan usaha pertanian, kemudian berangsur menurun bergeser kepada membesarnya pangsa kategori lapangan usaha industri dan jasa. Proses perubahan struktur tersebut idealnya akan diikuti dengan perubahan pergeseran dalam pasar tenaga kerja dalam arah yang sama. Namun demikian, pada prakteknya, kondisi tersebut tidak selalu berjalan.

Kondisi yang dijelaskan di atas, tampak berlangsung di Tanah Laut. Bukti nyata yang tampak dari menyusutnya distribusi PDRB kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang secara konsisten, dimana angkanya berkisar antara 18-19% dalam kurun waktu 4 tahun. Penurunan pangsa

pertanian tersebut diikuti oleh meningkatnya pangsa kategori lapangan usaha sekunder dan tersier (perdagangan dan jasa). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa proses pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah daerah telah mengurangi dominasi kategori pertanian di Tanah Laut dalam penciptaan nilai tambah. Postur ekonomi (dilihat dari share PDRB) Tanah Laut menunjukkan bahwa corak perekonomian Tanah Laut masih agraris. Hal ini terlihat <http://tanahlautkab.bps.go.id>

PDRB Kabupaten Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 dari besarnya pangsa kategori lapangan usaha pertanian dan pertambangan yang secara agregat menyumbang 47,47 % PDRB Tanah Laut pada tahun 2015. Kategori lapangan usaha pertambangan menjadi satu satunya sektor penyumbang nilai tambah terbesar sekaligus menjadi pintu penghubung perekonomian Tanah Laut dengan ekonomi global. Hal tersebut mengingat sebagian besar komoditas tambang yang diproduksi Tanah Laut mengalir melalui keran ekspor ke Cina, India dan Jepang. Meskipun corak ekonomi Tanah Laut masih tergolong agraris, namun peran kategori lapangan usaha industri manufaktur dapat dikatakan cukup strategis. Data distribusi PDRB Tanah Laut memperlihatkan bahwa pangsa industri manufaktur menjadi penyumbang nilai tambah dalam produksi barang dan jasa ketiga terbesar setelah kategori lapangan usaha pertambangan dan pertanian.

Pada tahun 2014, pangsa PDRB kategori industri mencapai 11,38%. Besarnya pangsa kategori industri Tanah Laut tidak lepas dari dukungan kinerja industri pengolahan makanan dan minuman, khususnya industri pengolahan kelapa sawit (CPO) dan dukungan dari kinerja kategori lapangan usaha perkebunan sawit.

Perlambatan ritme ekonomi global turut membawa dampak penyebaran keberbagai negara/wilayah. Hal ini disebabkan semakin terintegrasinya perekonomian antar negara sebagai konsekuensi dari semakin terbukanya perekonomian negara di dunia.

Luasnya dampak penyebaran krisis tersebut juga turut menyebabkan pemulihan/*recovery* perekonomian global menjadi berlarut-larut. Perekonomian Tanah Laut sebagai salah satu bagian integral perekonomian nasional juga tidak luput dari dampak krisis global. Kategori lapangan usaha pertambangan (batubara) menjadilapangan usaha dominan dalam perekonomian Tanah Laut, oleh karena itu, jalur perdagangan (ekspor) batubara menjadi rentan dari penularan dampak perekonomian global, yang pada akhirnya mau tidak mau akan mempengaruhi pergerakan mesinekonomi Tanah Laut.

Secara agregat, perekonomian Tanah Laut melambat sejak tahun 2012, yaitu dari 7,29% pada tahun 2011 menjadi 6,03%, dan pada periode setelahnya, laju pertumbuhan ekonomi Tanah Laut terus melambat menjadi 2,89% pada tahun 2015. Perlambatan tersebut diakibatkan karena melambatnya kategori lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan selama ini. Pertambangan batubara adalah salah satunya. *Share* PDRB kategori pertambangan batubara yang besar sangat mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi Tanah Laut.

Potret tersebut menggambarkan dari melemahnya pertumbuhan ekonomi Tanah Laut dalam beberapa tahun belakangan. Faktor pemicu utama perlambatan ekonomi di dunia belakangan adalah krisis Eropa yang tidak kunjung reda. Dampak krisis tersebut tidak hanya menimpakawasan Eropa, namun menyebar ke berbagai negara dan kawasan lain. Permintaan dunia menjadi salah satu efek dari perlambatan akibat krisis tersebut. Hal ini tampak dari melambatnya permintaan beberapa komoditas dunia, termasuk diantaranya batubara. Krisis global dan berlebihnya produksi minyak USA, bahkan tertinggi selama seperempat abad terakhir turut menyebabkan permintaan batubara melambat.

Perlambatan permintaan dunia terhadap batubara tercermin dari turunnya harga batubara dan penurunan volume perdagangan batubara (ekspor impor). Kondisi tersebut tentu menyebabkan negara/wilayah yang memproduksi batubara juga terimbas. Kasus tersebut juga berimbas pada perekonomian Tanah Laut.

Dalam perekonomian Tanah Laut, pertambangan batubara menyumbang sekitar 28-30% dari nilai tambah total. Hal ini menjadikan pertambangan batubara menjadi kategori lapangan usaha yang memiliki *share* terbesar.

Dilihat dari PDRB Perkapita, bahwa Pembangunan tidak cukup hanya menyoal pencapaian pertumbuhan ekonomis saja. Akan tetapi terdapat banyak dimensi yang dicakup dan target yang ingin dicapai. Salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Pertumbuhan hanyalah sasaran antara (syarat perlu) bagi tercapainya kesejahteraan.

Tanpa pertumbuhan, esensi pembangunan akan menjadi bias dan identik dengan membagi-bagikan kemiskinan. Ukuran kesejahteraan memang sulit tercakup dalam satu indikator yang komprehensif, karena masalah aspek multidimensi yang melatar belakangnya. Namun demikian, banyak literatur dan kajian akademik yang menggunakan berbagai alternatif, diantaranya adalah dengan pendekatan variabel PDRB perkapita. PDRB perkapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada waktu tertentu.

Negara yang sudah maju, rata-rata memiliki PDB perkapita yang lebih besar dibandingkan dengan negara yang sedang berkembang. Menurut klasifikasi World Bank, negara yang berpendapatan perkapita kurang dari \$1.045 dikategorikan sebagai negara berpendapatan rendah. Sementara negara yang berpendapatan perkapita antara \$1.045- \$4.125 termasuk negara berpendapatan menengah bawah (*lower middle income*), negara yang memiliki pendapatan perkapita antara \$4.125-\$12.746 dikategorikan sebagai negara yang berpendapatan menengah tinggi (*upper middle income*). Sedangkan negara yang memiliki pendapatan perkapita lebih dari \$12.746 termasuk negara berpendapatan perkapita tinggi.

**Tabel 2.3**  
**Pertumbuhan Ekonomi Tanah Laut**

Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1,62	1,84	3,83	1,70	2,35
B	<b>Pertambangan &amp; Penggalian</b>	<b>13,56</b>	<b>8,89</b>	<b>4,94</b>	<b>-0,91</b>	<b>-2,22</b>
C	Industri Pengolahan	3,89	5,11	4,67	4,64	4,34
D	Pengadaan Listrik & Gas	6,54	6,96	5,83	18,14	25,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	2,13	2,11	2,64	8,86	5,64
F	Konstruksi	5,13	6,13	5,75	6,47	6,34
G	Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,79	6,65	8,54	8,76	8,20
H	Transportasi & Pergudangan	4,63	6,00	7,12	6,76	6,97
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5,87	6,08	7,18	6,73	6,20
J	Informasi & Komunikasi	6,15	4,88	6,52	9,36	8,37
K	Jasa Keuangan & Asuransi	6,71	5,94	14,02	7,24	4,92
L	Real Estate	6,36	5,17	6,73	5,46	5,65
M, N	Jasa Perusahaan	6,82	6,43	7,44	6,89	6,58
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	7,67	5,83	5,81	5,53	8,71
P	Jasa Pendidikan	3,43	4,03	7,40	8,14	9,36
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	6,58	6,95	10,44	6,75	7,53
R, S, T, U	Jasa Lainnya	3,25	3,37	2,60	8,24	6,12
<b>PDRB</b>		<b>7,29</b>	<b>6,03</b>	<b>5,49</b>	<b>3,05</b>	<b>2,89</b>

\*)Angka Diperbaiki

\*\*) Angka Sementara

Perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Tanah Laut selama kurun tahun 2011-2015 PDRB perkapita Tanah Laut semakin meningkat setiap tahunnya dari 26,844 juta rupiah pada tahun 2011 menjadi 33,288 juta rupiah pada tahun 2015, atau tumbuh rata-rata 5,53 persen setiaptahunnya. Namun demikian, apabila diukur dalam USD, PDRB perkapita Tanah Laut masih termasuk dalam jajaran wilayah berpendapatan menengah bawah.

Dari sisi PDRB perkapita konstan, PDRB perkapita Tanah Laut tumbuh melambat selama periode 2012-2015, atau dari 4,20 persen pada tahun 2012 menjadi 1,25 persen pada tahun 2015. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika perekonomian Tanah Laut yang sedang mengalami perlambatan dalam kurun waktu yang sama.

PDRB digunakan sebagai ukuran yang dapat mencerminkan perkembangan kegiatan perekonomian suatu wilayah. Tahun 2015 PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Tanah Laut mencapai Rp 10,795 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 PDRB Tanah Laut sebesar Rp 8,830 triliun.

Pada tahun 2015, perekonomian di Tanah Laut tumbuh sekitar 2,89 persen, terjadi perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sekitar 3,05 persen di tahun 2014. Perlambatan perekonomian ini terjadi karena adanya penurunan produksi pada sektor pertanian, terutama perkebunan dan kehutanan. Selain itu, hal yang sama juga terjadi pada sektor pertambangan, terutama pertambangan batubara. Harga batubara yang terus melemah menyebabkan banyak pengusaha yang memilih untuk vakum.

Secara umum ada 3 sektor yang cukup dominan dalam pembentukan total PDRB ADHB Tanah Laut tahun 2015, yaitu sektor pertambangan 28,17 persen, sektor pertanian 19,30 persen, dan sektor industri pengolahan sebesar 11,39 persen. Apabila dilihat dari sisi penggunaan, maka konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi mencapai 45 persen terhadap pembentukan PDRB. Piramida penduduk Tanah Laut yang gemuk pada kelompok

usia mudaturut membentuk pola konsumsi sehingga porsipengeluaran untuk konsumsi rumah tanggamenjadi lebih besar.

### 2.2.3 Sektor Unggulan di Kabupaten Tanah Laut

**Gambar 2.1**

**Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan (Ton)  
di Tanah Laut Tahun 2015**



Untuk komoditas perkebunan, kelapa sawitmasih menjadi primadona yang banyak diusahakanoleh sebagian besar penduduk Tanah Laut. Produksiperkebunan rakyat kelapa sawit pada tahun 2015mencapai 15.191 ton yang disusul oleh komoditaskaret sebesar 6.437 ton. Kedua komoditasperkebunan inilah yang masih menjadi primadonadan banyak diusahakan oleh masyarakat.

**Gambar 2.2**

**Produksi Perikanan di Tanah Laut,  
2014-2015 (ton)**



Produksi perikanan di Tanah Laut padatahun 2015 mencapai 33.161 ton atau turun 15,62%dibandingkan tahun

2015. Penurunan tersebut berasal dari turunnya produksi perikanan darat sebesar 12,72 persen ditambah produksi perikanan laut yang juga turun sebesar 15,94 persen. Faktor cuaca yang kurang bersahabat menjadi salah satu penyebab turunnya produksi perikanan. Padahal kedua jenis perikanan itu berkontribusi sangat besar terhadap total produksi perikanan Tanah Laut yaitu 9 persen untuk perikanan darat dan 91 persen untuk perikanan laut.

Ada banyak jenis ikan laut yang bisa didapatkan di perairan laut ini, misalnya tenggiri, kakap, bawal, tongkol, udang dan masih banyak lagi yang lainnya. Ikan-ikan ini dijual dalam bentuk ikan masih segar atau diolah menjadi ikan asin. Namun untuk komoditas ikan laut sangat tergantung dengan kondisi cuaca. Apabila curah hujan cukup tinggi maka para nelayan memilih untuk berhenti melaut. Sementara untuk ikan di perairan umum yang banyak diusahakan oleh masyarakat adalah ikan gabus dan papuyu.

Tanah Laut dikenal sebagai salah satu sentra peternakan di Kalimantan Selatan. Ada beberapa jenis ternak kecil dan ternak besar yang diusahakan oleh penduduk Tanah Laut. Yang paling menonjol adalah komoditas sapi potong. Setiap menjelang Hari Raya Kurban, selalu dibanjiri permintaan pengiriman sapi potong dari kabupaten lain. Selain itu, daging sapi yang berasal dari Tanah Laut juga dianggap mampu memenuhi kebutuhan pasokan daging sapi untuk wilayah Kalimantan Selatan.

Secara umum populasi ternak baik besar, kecil, maupun unggas mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, kecuali sapi perah, kambing, domba dan itik. Sapi perah turun mencapai 15 persen karena banyak yang mengalami kematian dan dipotong. Hal yang sama juga dialami oleh domba. Untuk populasi ternak unggas, ayam ras pedaging dan ayam buras mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu 85,56 persen dan 31,05 persen. Sedangkan populasi ayam ras petelur naik sebesar 30,35 persen. Sedangkan populasi itik turun sebesar 4,10 persen.

## 2.2.4 Infrastruktur Dasar dan Penataan Wilayah

### a) Infrastruktur Dasar

#### 1. Jalan

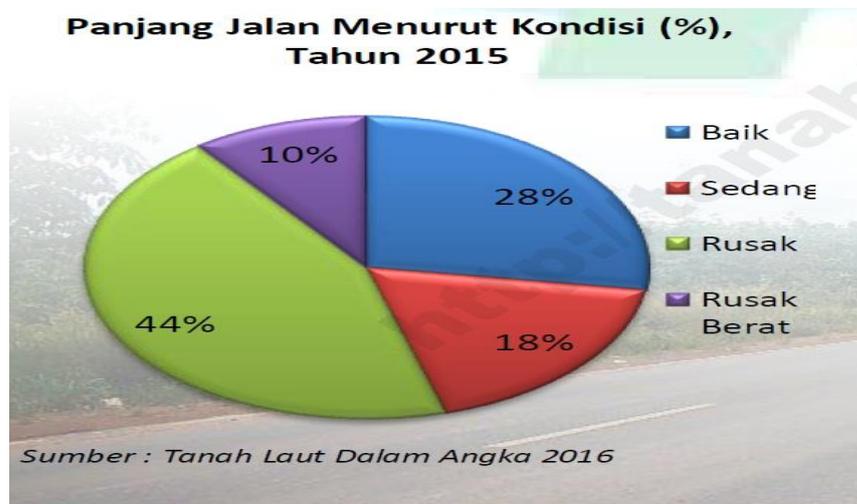
Pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah yang pesat tanpa diikuti dengan pengadaan sistem transportasi yang memadai untuk ukuran daerah itu merupakan bentuk besarnya *demand* daripada *supply* nya. Begitu pula sebaliknya, lajunya pertumbuhan sistem transportasi yang tidak sesuai dengan ukuran perkembangan suatu daerah, merupakan wujud *supply* lebih besar daripada *demand* untuk transportasi.

Permasalahan transportasi khususnya transportasi darat cukuplah kompleks, karena transportasi merupakan suatu sistem yang saling berkaitan, maka satu masalah yang timbul di satu unit ataupun satu jaringan akan mempengaruhi sistem tersebut.

Kegiatan perekonomian daerah akan berjalan dengan lancar apabila didukung dengan fasilitas infrastruktur jalan yang baik. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah Tanah Laut telah membangun jalan sepanjang 1.826,63 km jalan kabupaten dan 104,91 km jalan provinsi. Dari total panjang jalan yang telah dibuat, terdapat 39 persen jalan yang sudah diaspal sedangkan sisanya masing-masing sebesar 55 persen berupa kerikil dan 6 persen masih berupa tanah.

**Gambar 2.3**

**Panjang Jalan Menurut Kondisi (%),  
Tahun 2015**



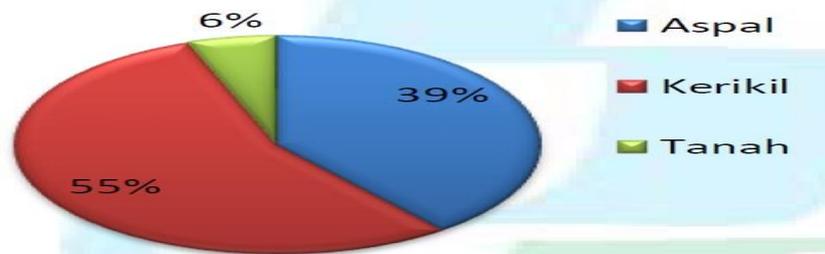
Apabila dilihat dari kondisi jalan, ternyata ada sekitar 28 persen jalan dengan kondisi baik dan ada sekitar 44 persen dalam keadaan rusak. Sementara jalan dengan kondisi rusak berathanya sebesar 10 persen. Kondisi ini perlu untuk ditingkatkan dalam mendukung perkembangan perekonomian Tanah Laut yang letaknya cukup strategis.

Pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah yang pesat tanpa diikuti dengan pengadaan sistem transportasi yang memadai untuk ukuran daerah itu merupakan bentuk besarnya *demand* daripada *supply* nya. Begitu pula kebalikannya, lajunya pertumbuhan system transportasi yang tidak sesuai dengan ukuran perkembangan suatu daerah, merupakan wujud *supply* lebih besar daripada *demand* untuk transportasi.

Permasalahan transportasi khususnya transportasi darat cukuplah kompleks, karena transportasi merupakan suatu sistem yang salingberkaitan, maka satu masalah yang timbul di satu unit ataupun satu jaringan akan mempengaruhi sistem tersebut. Kegiatan perekonomian daerah akan berjalan dengan lancar apabila didukung dengan fasilitas infrastruktur jalan yang baik. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah Tanah Laut telah membangun jalan sepanjang 1.826,63 km jalan kabupaten dan 104,91 km jalan provinsi. Dari total panjang jalan yang telah dibuat, terdapat 39 persen jalan yang sudah diaspal sedangkan sisanya masing-masing sebesar 55 persen berupa kerikil dan 6 persen masih berupa tanah. Kondisi ini perlu untuk ditingkatkan dalam mendukung perkembangan perekonomian Tanah Laut yang letaknya cukup strategis.

**Gambar 2.4**

**Panjang Jalan Menurut Permukaan (%), Tahun 2015**



Sumber : Tanah Laut Dalam Angka 2016

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan diikuti dengan perbaikan pelayanan sarana prasarana publik dan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan dan terminal. Infrastruktur yang terbatas akan mengganggu jalannya kegiatan ekonomi daerah. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu modal pembangunan yang mendukung perekonomian suatu wilayah.

Pada tahun 2015, kinerja sektor konstruksi mengalami sedikit perlambatan. Sektor konstruksi tumbuh sebesar 6,34persen pada tahun 2015 dariyang sebesar 6,47 persen pada tahun 2014. Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan antara lain adanya kenaikan harga bahan bangunan sebagai akibat kenaikan kurs nilai tukar rupiah. Apabila dilihat dari *share* terhadap pembentukan PDRB Tahun 2015, sektor konstruksi telah berkontribusi sebesar 6,80 persen. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya 6,21 persen. Sementara itu, realisasi pemberian kredit oleh pihak perbankan terhadap pelaku usahakonstruksi cenderung mengalami peningkatan setiap bulannya selama tahun 2015. Pemberian kreditter tinggi diberikan pada bulan Januari 2015 sebesar 132,376 milyar rupiah. Sebagai salah satu sektor yang ikut andil dalam pembangunan, konstruksi diharapkan akan terus berkembang. Hal ini tidak hanya dilihat dari seberapa besar nilai konstruksi yang dihasilkan, tapi juga bagaimana sektor konstruksi ini dapat diandalkan dalam hal penyediaan lapangan kerja. Sehingga dapat mendorong kemajuan kegiatan perekonomian secara global di Tanah Laut.

### **2.2.5 Pelabuhan Laut**

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tanah Laut berada di wilayah pesisir pantai timur pulau Kalimantan, sehingga memiliki potensi yang besar bagi pengembangan jaringan transportasi laut, jaringan prasarana transportasi laut saat ini dikembangkan bagi pelabuhan khusus untuk kepentingan angkutan pertambangan, perikanan, perkebunan, namun jaringan prasarana transportasi laut ini diusahakan untuk dikembangkan sebagai jaringan transportasi umum, mengingat potensi kedepan sebagai pelabuhan umum dapat dikembangkan di Kabupaten Tanah Laut dengan lahan yang masih sangat tersedia bagi pengembangan masterplan pelabuhan.

**Tabel 2.4**  
**Arus Bongkar Muat Barang Angkutan Antar Pulau**  
**Per Bulan di Pelabuhan Kintap, Tahun 2013**

<b>Bulan</b>	<b>Barang (Ton)</b>	
	<b>Bongkar</b>	<b>Muat</b>
Januari	47.636	3.420.483
Februari	126.060	3.437.545
Maret	19.865	3.665.079
April	3.927	4.194.022
Mei	3.804	4.633.154
Juni	11.330	4.299.435
Juli	20.655	3.502.427
Agustus	21.375	2.288.510
September	0	3.514.838
Oktober	16.764	3.661.49
November	19286	4.204.769
Desember	5.585	4.453.469
<b>Jumlah 2013</b>	<b>296.287</b>	<b>45.275.228</b>
<b>Jumlah 2012</b>	<b>456.130</b>	<b>44.554.211</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik, Kalimantan Selatan, 2014.*

Selama tahun 2013 arus bongkar barang yang terjadi di Pelabuhan Kintap sebesar 296.287 ton atau mengalami penurunan 35,04 persen dibanding tahun 2012 yang mencapai 456.130 ton. Sebaliknya, arus muat barang mengalami peningkatan walaupun relatif kecil yaitu sebesar 1,62 persen (44.554.241 ton pada tahun 2012 menjadi 45.275.228 ton pada tahun 2013).

Komoditi yang dibongkar di Pelabuhan Kintap antara lain batubara sebesar 257.466 ton, gas/LNG 30.000 ton, dan BBM 5.655 ton. Sedangkan komoditi yang dimuat di pelabuhan ini antara lain batubara 45.251.940 ton, pasir besi 42.883 ton, dan Gas/LNG 16.297 ton.

### **2.2.6 Telekomunikasi**

Ditengah persaingan informasi yang ditandai menjamurnya sarana telekomunikasi, kecepatan dan infrastruktur komunikasi mutlak diperlukan. PT Pos Indonesia sebagai salah satu BUMN yang berwenang dalam melayani dan mengendalikan arus informasi serta komunikasi, memiliki andil besar dalam menciptakan banyak kemudahan dalam berkomunikasi bagi masyarakat luas.

Seiring dengan perkembangan waktu, teknologi informasi dan komunikasi mempermudah kehidupan manusia. Jika menggunakan alat teknologi informasi dan komunikasi, dua benua akan terasa tidak berjarak. Kehadiran komputer, internet, telepon seluler, dan berbagai alat teknologi informasi dan komunikasi membuat arus informasi semakin lancer Perkembangan teknologi informasi di Tanah Laut menunjukkan fenomena yang meningkat. Hal ini terlihat dari jumlah pengguna internet *speedy* yang mengalami peningkatan selama tahun 2014-2015. Untuk pengguna internet *speedy* terjadi kenaikan mencapai sebesar 12persen yaitu menjadi 937 pengguna di tahun 2015. Keberadaan telepon selular yang marak belakangan ini ternyata tidak memberi dampak pada berkurangnya pelanggan telepon konvensional.

Halini terlihat dari naiknya pemakaian telepon konvensional yang bertambah menjadi sebanyak 155 pengguna. Sebagian besar pengguna telepon ini adalah instansi pemerintahan ataupun pelaku usaha. Jumlah warung internet pada tahun 2015 juga menunjukkan fenomena yang sama, dimana terjadi kenaikan sebesar 53 persen. Keberadaan Kantor Pos sebagai penyedia jasa pengiriman surat-menyurat ternyata masih di perlukan. Kecanggihan teknologi dan menjamurnya jasa pengiriman milik swasta tidak meruntuhkan dominasi kantor pos. Apalagi sekarang kantor pos tidak sekedar melayani jasa pengiriman barang namun sudah menjadi lembaga keuangan non bank. Di Tanah Laut pada tahun 2015 ada 8 kantor pos, 1 rumah pos dan 7 agen pos yang bertugas dalam jasa pengiriman barang.

### **2.2.7 Listrik, dan Air Bersih**

Pelayanan listrik di kabupaten Tanah Laut menunjukkan peningkatan dari segi jumlah pelanggan dan energy yang di distribusikan. Pusat pembangkit listrik di Kabupaten Tanah Laut sebagian besar kebutuhannya dipenuhi oleh Perusahaan Umum Listrik Negara Wilayah VI Banjarmasin, Jumlah KWH yang dibangkitkan dan KWH yang terjual nampaknya terus bertambah dari tahun ke tahun.

Listrik merupakan sumber penerangan energi dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Selama tahun 2013-2015, jumlah listrik yang terjual terus mengalami peningkatan hingga mencapai 161 ribu Kwh pada tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsumsi dan ketergantungan masyarakat terhadap sumber energi listrik masih tinggi.

Pada saat ini kebutuhan listrik di wilayah Tanah Laut di pasok dari PLTU Asam-Asam dan beberapa unit PLTD, sektor energi khususnya listrik menjadi instrument penting dalam pembangunan Kabupaten Tanah Laut, daya listrik yang terbatas dan kebutuhan yang terus meningkat mengakibatkan rendahnya daya layanan kelistrikan, hal ini dibuktikan dengan seringnya

pemadaman listrik secara bergiliran.

Selain listrik, penggunaan air minum bersih yang bersumber dari PDAM juga masih diperlukan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Namun produksi air minum bersih pada tahun 2015 mengalami penurunan dari 1.226 ribu meter kubik menjadi 1.104 meter kubik.

Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayah Kabupaten Tanah Laut, PDAM mendapatkan sumber air baku yang berasal dari air permukaan, sumur bor dalam (*deep well*) maupun mata air.

Air baku yang diproduksi oleh PDAM Kabupaten Tanah Laut untuk sumber air baku dari sumur bor dalam (*deep well*) tidak dilakukan pengolahan secara khusus, tetapi hanya dilakukan dengan penambahan klor (klorinasi) mengingat kualitasnya masih memenuhi syarat kesehatan, sedangkan dari air permukaan dilakukan pengolahan sederhana yang umumnya adalah menggunakan bak prasedimentasi dan *slow sand filter* (saringan pasir lambat) dan pembubuhan bahan kimia seperti tawas/chlor.

**Tabel 2.5**  
**Sumber Air Baku di Kabupaten Tanah Laut**

No.	IKK	Sumber Air Baku	Tingkat Kekeruhan	Keterangan
1.	Pelaihari	Sungai Tabanio, Mata Air dan Sumur Bor	Tinggi Baik	Saat Musim Kemarau
2.	Takisung	Anak Sungai	Baik	Kemarau Kering
3.	Penyipatan	Mata Air (Gunung Kauyuhan) Panyipatan Mata Air (G.Birah) Kandangan Lama	Baik	Kemarau Kering
4.	Bati-Bati	Sungai Banyu Hirang (Pandahan)	Baik/Konsentrasi Rendah	
.	Batu Ampar	Mata Air (Gunung Batu Ampar) Mata Air (Gunung Durian Bungkuk)	Baik	Kemarau Kering
6.	Asam-Asam	Sungai Naiyah	Tinggi	
7	Tambang Ulang/Gn Raja	Air Tanah Dalam	Baik	
8.	Kurau	Air Tanah Dalam	Baik	

*Sumber: PDAM Tanah Laut*

### **2.2.8 Penataan Wilayah**

Adapun yang menjadi tujuan tata ruang seperti termaktub dalam RTRW Kabupaten tanah Laut adalah : “ *Mewujudkan penataan ruang Kabupaten Tanah Laut yang indah, damai, nyaman dan dinamis sebagai kota yang terdepan dalam pelayanan pendidikan, perdagangan dan jasa, industri, pemerintahan, dan permukiman dengan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan* ”.

Sebagai wujud dari penataan ruang maka RTRW Kabupaten Tanah Laut dijadikan pedoman dalam :

1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang;
2. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah;
3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Tanah Laut;
4. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor;
5. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
6. Penataan ruang kawasan strategis;
7. Penataan ruang wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi. Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas:

- a. PKN (pusat kegiatan nasional) yang berada di wilayah kabupaten;
- b. PKW (pusat kegiatan wilayah) yang berada di wilayah kabupaten;
- c. PKL (pusat kegiatan lingkungan) yang berada di wilayah kabupaten;
- d. PKS (pusat kegiatan strategis nasional) yang berada di wilayah kabupaten; dan
- e. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang

wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:

- 1) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan
- 2) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

**Tabel 2.6**  
**Sistem Perwilayahan Kabupaten Tanah Laut**

Perkotaan	Peran	Perkotaan	Peran
Pelaihari	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Takisung	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
Bati-Bati	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)/ Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)	Jorong	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
Kintap	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Tambang Ulang Bumi Makmur Kurau Panyipatan Batu Ambar Bajuin	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Sumber: Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut

Prioritas pembangunan sistem perkotaan di Kabupaten Tanah Laut meliputi:

1. Mempercepat pengembangan Perkotaan Pelaihari dan Bati-Bati sebagai PKL dan PKLp melalui kerjasama dengan daerah lain khususnya *Greater Banjarmasin* (Banjarmasin, Banjarbaru dan Banjar) dan Kapet Batulicin sebagai pusat pengembangan industri, pelabuhan dan pariwisata;
2. Mendorong dan mempercepat pengembangan perkotaan Bati-Bati sebagai fungsi PKLp dan PPK sebagai kota industri pengolahan dan industri pertanian dan daerah hinterland dari *Greater Banjarmasin*;
3. Mendorong pengembangan perkotaan Kintap, Jorong dan Takisung sebagai perkotaan dengan fungsi PPK yang didukung dengan pengembangan industri berbasis sumber

daya alam dan pengembangan kota-kota pantai;

4. Meningkatkan pengembangan kota-kota yang berperan sebagai PPL yang ada di sekitar pertumbuhan perkotaan dengan fungsi PPK maupun desa-desa pendukungnya.

Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten meliputi sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang mengintegrasikannya dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah kabupaten.

**Tabel 2.7**  
**Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut**

Wilayah Pembangunan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Pusat WP dan Wilayah Pelayanan	Fungsi Kegiatan
Wilayah Pembangunan	1254,75	<b>Pusat WP : Kota</b> Wilayah Pelayanan Kecamatan yaitu Kecamatan Takisung Dan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Pusat Pemerintahan Kabupaten Tanah</li> <li>▫ Pusat Perdagangan Jasa</li> <li>▫ Pusat Pelayanan Pendidikan,</li> <li>▫ Industri Pengolahan Pertanian dan Rumah Tangga</li> <li>▫ Perkebunan dan sub sektor</li> <li>▫ Permukiman</li> <li>▫ Pariwisata buatan</li> <li>▫ Pertanian</li> </ul>
Wilayah Pembangunan II	66,35	<b>Pusat WP : Bati-Bati</b> Wilayah Pelayanan meliputi 3 Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Kurau, Kecamatan Tambang Ulang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Pengembangan sub pertanian dan perkebunan Kawasan h konservasi</li> <li>▫ Perikanan laut dan Peternakan</li> <li>▫ Industri Rumah Tangga</li> <li>▫ fasilitas umum, dan</li> </ul>
Wilayah Pembangunan III	1713,1	<b>Pusat WP : Jorong</b> Wilayah Pelayanan Kecamatan Jorong, Kintap dan Kecamatan Batu Ampar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Pengembangan sub pertanian dan perkebunan</li> <li>▫ Kehutanan</li> <li>▫ Pertambangan</li> </ul>

*Sumber: Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut 2011 – 2031*

Rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten/kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten/kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. Terdiri dari rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.

1. **Kawasan Lindung** adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Kawasan lindung dapat dibagi menjadi kawasan yang memberikan perlindungankawasan persawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung lainnya..

2. **Kawasan Budi Daya** adalah kawasan budi daya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

**Tabel 2.8**  
**Penetapan Kawasan Budidaya**

JENIS KAWASAN	KRITERIA PENETAPAN
<b>Kawasan Pertanian dan Kawasan Perkebunan</b>	Lahan pertanian perdesaan: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Memperhatikan kriteria kesesuaian lahan</li><li>➤ Memperhatikan kriteria teknis sektoral</li><li>➤ Tidak mengubah penggunaan lahan lain yang lebih produktif</li></ul> Lahan pertanian Perkotaan <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Memperhatikan kriteria kesesuaian lahan</li><li>➤ Memperhatikan kriteria teknis sektoral</li><li>➤ Tidak mengubah penggunaan lahan lain yang lebih produktif</li><li>➤ Memperhatikan batas kota</li><li>➤ Memperhatikan kriteria penataan ruang terbuka hijau</li><li>➤ Memperhatikan RUTRK/RDTRK/RTRK</li></ul>
<b>Kawasan Perikanan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Menjaga fungsi perlindungan keberadaan danau sebagai daerah resapan air</li><li>➤ Menjaga fungsi pelestarian perlindungan keberadaan danau sebagai sumber air bersih potensial</li></ul>
<b>Kawasan Perindustrian</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pada daerah perdesaan diarahkan pada sentra-sentra industri dan kerajinan terutama dikawasan permukiman yang telah ada</li><li>➤ Pada daerah perkotaan diarahkan dengan mempertimbangkan batas wilayah kota, RUTRK/RDTRK/RTRK.</li></ul>
<b>Pariwisata</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Diarahkan pada pengembangan berbagai daya tarik objek wisata alam maupun objek wisata budaya</li><li>➤ Diarahkan pada pengembangan objek wisata yang memiliki keunikan atau daya tarik yang khas</li><li>➤ Diarahkan pada pengembangan objek wisata yang terkait dalam satu kesatuan pengembangan kepariwisataan baik lingkup kabupaten Tanah Laut maupun lingkup Provinsi</li></ul>

JENIS KAWASAN	KRITERIA PENETAPAN
<b>Permukiman</b>	<p>Lahan permukiman pedesaa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menghindari sawah irigasi teknis</li> <li>➤ Memperhatikan keterkaitan dengan pusat pertumbuhan dan aksesibilitas wilayah</li> <li>➤ Memperhatikan keseimbangan fungsi dengan pengembangan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain</li> <li>➤ Memperhatikan kecenderungan perkembangan penduduk di setiap bagian wilayah</li> <li>➤ Memperhatikan daya tampung perkembangan penduduk di setiap bagian wilayah</li> <li>➤ Memperhatikan pengembangan infrastruktur serta sarana yang dibutuhkan.</li> </ul> <p>Lahan Permukiman Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ketentuan Permendagri No. 7 Tahun 1986 tentang Batas wilayah Kota</li> <li>➤ Ketentuan Peraturan daerah tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Kabupaten Tanah Laut</li> <li>➤ Memperhatikan kecenderungan perkembangan penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di setiap wilayah</li> <li>➤ Memperhitungkan daya tampung perkembangan penduduk di setiap bagian wilayah</li> <li>➤ Memperhatikan pengembangan infrastruktur serta sarana yang dibutuhkan</li> </ul>

*Sumber : Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah  
Kabupaten Tanah Laut*

**Tabel 2.9**  
**Rencana Pola Ruang Kabupaten Tanah Laut**

No	RENCANA	Luas/Ha
	<b>KAW. LINDUNG</b>	
1	Hutan Lindung	10.970
2	Sempadan Sungai	20.296,14
	Jumlah Lindung	28.239,36
	<b>KAW. BUDIDAYA</b>	
1	Hutan Produksi Tetap	7.117,00
2	Hutan Produksi Konversi	6758
3	Hutan Produksi Terbatas	961,00
4	Pengembangan Kelapa Sawit	86.522,00
5	Pemukiman	15.517,35
6	Perkebunan	92.739,62
7	Pertanian Lahan Basah	41.136,60

No	RENCANA	Luas/Ha
8	<i>Pertanian Lahan Kering</i>	18.911,82
9	<i>Zona Industri</i>	3.041,43
	<i>Jumlah Budidaya</i>	188.655,75
	<b>TOTAL LINDUNG+BUDIDAYA</b>	<b>217.495,00</b>

*Sumber: Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut 2011-2031*

Selanjutnya beberapa kawasan yang merupakan kawasan strategis di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari kawasan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis sosio-kultural dan kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup. Kawasan strategis di wilayah Kabupaten tanah Laut diarahkan pada 3 fungsi kawasan strategis, yaitu:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu:

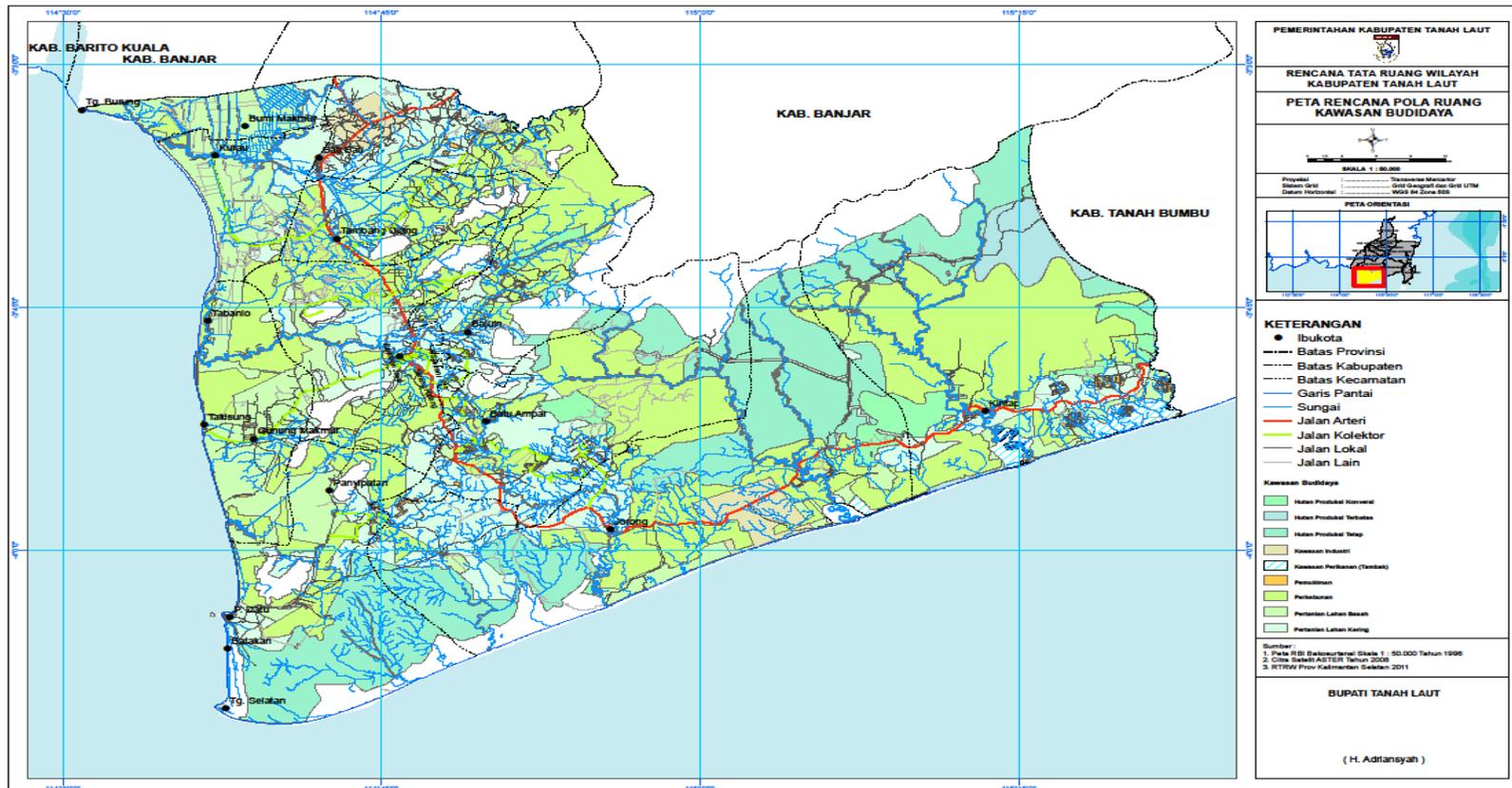
- Kawasan Metropolitan Banjarmasin/Banjarmasin Raya yang wilayahnya terdiri dari sebagian wilayah di Kabupaten Tanah Laut yaitu Kecamatan Bati-Bati, Kurau, Bumi Makmur dan Tambang Ulang yang berfungsi sebagai kota kecil yang bercirikan perkotaan metropolitan untuk mendukung perkembangan wilayah Banjarmasin Raya.
- Kawasan Agropolitan, yang meliputi Kecamatan Pelaihari, Bajuin, Panyipatan dan Batu Ampar 52.060 Ha.

Fungsi dari kawasan ini adalah mempercepat tercapainya kawasan pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di kawasan agropolitan terutama dalam penanganan infrastruktur kawasan dan

pengembangan budidaya dan pasca produksi.

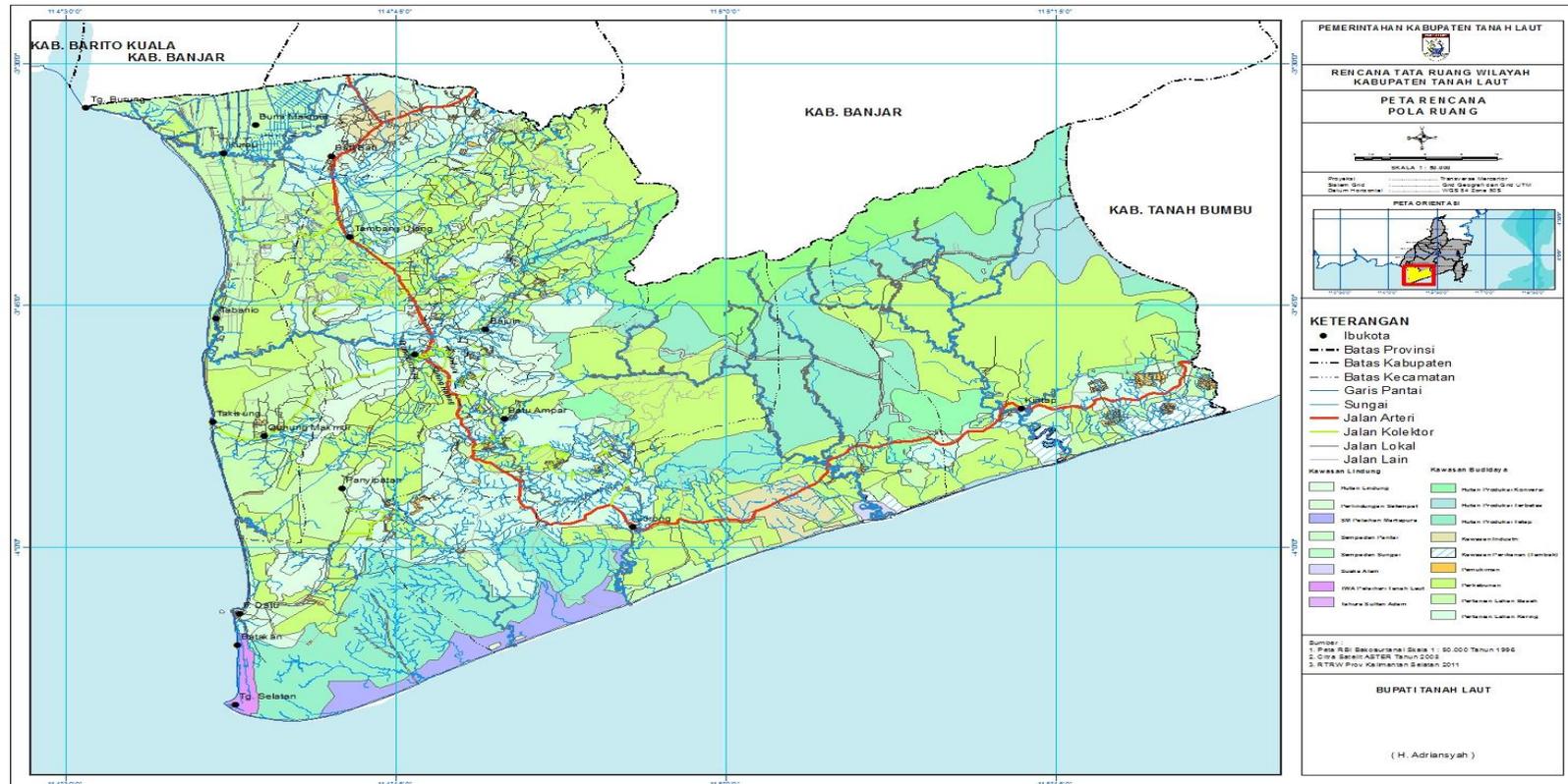
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sumber daya alam dan teknologi tinggi adalah: Kawasan Pembangkit Energi Listrik, yaitu kawasan yang memproduksi energy listrik untuk keperluan wilayah provinsi Kalimantan Selatan dan sekitarnya yaitu PLTU Asam-Asam.
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri dari:
  - Kawasan hutan lindung Tahura (Taman Hutan Raya) Sultan Adam dengan luas 18.358 Ha.
  - Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan terbuka sepanjang pantai timur-tenggara dengan berbagai pola pemanfaatan ruang baik lindung maupun budidaya di Kabupaten Tanah Laut.

**Gambar 2.5**  
**Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Tanah Laut**



**Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Tanah Laut Tahun 2011-2031**

**Gambar 2.6**  
**. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tanah Laut**



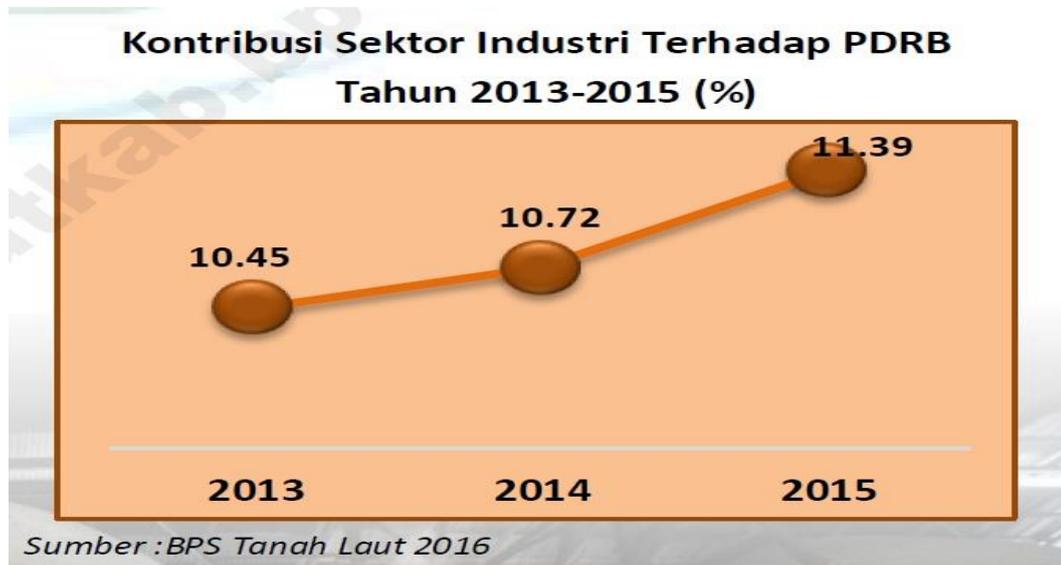
**Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Tanah Laut Tahun 2011-2031**

### **2.3 Kondisi Industri Secara Umum**

Sektor industri pengolahan merupakan salahsatu sektor andalan (*leading sector*) di Tanah Laut. Kekayaan sumber daya alam di Tanah Laut pada perkebunan, perikanan dan pertanian mendorong tumbuhnya industri, baik formal dan non formal. Berdasarkan kelompok industri, perusahaan industri dikelompokkan menjadi industri yang mengelola hasil pertanian dan kehutanan (IHPK), industri yang mengelola logam mesin dan kimia (ILMK) dan industri aneka (IA). Sektor industri pengolahan ternyata masih cukup dominan dalam pembentukan PDRB Tanah Laut. Hal ini bisa dilihat dari kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku ternyata menduduki peringkat ketiga yaitu sebesar 11,39 persen dengan Nilai Tambah Bruto (NTB) sebesar 1.229,2 milyar rupiah. Kontribusi ini sedikit mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 10,72 persen. Kenaikan ini disebabkan karena nilai tambah pada sektor industri pengolahan ini lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan nilai tambah pada sektor lain.

Selama periode tahun 2013-2015 sektor industri pengolahan sedikit mengalami perlambatan. Pada tahun 2015, laju pertumbuhan mengalami sedikit perlambatan menjadi 4,34 persen. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor, yakni melemahnya kurs rupiah yang berdampak terhadap kenaikan harga bahan baku dan barang modal impor, keterbatasan pasokan energi ke sektor industri akibat kenaikan harga gas dan tarif dasar listrik serta dampak dari kebijakan kenaikan suku bunga BI yang sengaja diperlambat untuk mengendalikan inflasi yang tinggi.

Gambar 2.7



Kategori lapangan usaha manufaktur dalam PDRB atas dasar tahun 2010, dibagi 16 sublapangan usaha. Sublapangan usaha yang mendominasi kinerja industrimanufaktur di Tanah Laut adalah industri makanan dan minuman. Produksi industrimakanan dan minuman rata-rata mencapai lebih dari 80 persen dari total produksi industri pengolahan keseluruhan di Tanah Laut. Komoditas utama dari industrimakanan dan minuman Tanah Laut adalah *crude palm oil* (CPO). Komoditas tersebut menjadi kontributor terbesar kedua ekspor Tanah Laut setelah batubara. Oleh karena itu, kinerja industri makanan dan minuman Tanah Laut tidak terlepas dari pengaruh dinamika perekonomian global. Penurunan harga komoditas sawit dunia turut menyeret harga pasaran CPO ke arah kontraksi, sebagai efek menurunnya permintaan komoditas tersebut di dunia.

Kinerja industri CPO didukung oleh kinerja sublapangan usaha perkebunan komoditasawit yang terkonsentrasi di beberapa wilayah sentra produksi utama (Panyipatan, Pelaihari, Batu Ampar, Jorong dan Kintap). Selain industri makanan dan minuman, penyumbang terbesar nilai tambah dalam industri manufaktur Tanah Laut adalah industri karet yang menyumbang PDRB mencapai 8,49 persen dari total PDRB industri pengolahan

Tanah Laut. Sebagian besar produksi karet alam di Tanah Laut diekspor dalam bentuk mentah. Ekspektasi pertumbuhan/kinerja industri karet masih menjanjikan seiring dengan pertumbuhan industri otomotif, konstruksi dan pertumbuhan negara tujuan ekspor karet alam Tanah Laut. Industri karet juga menjadi pengungkit (*leverage*) bagi perkebunan karet yang banyak diusahakan oleh petani karet di Tanah Laut.

**Gambar 2.8**



Selain itu pula kedepannya di Kabupaten Tanah Laut khususnya di kawasan Jorong akan dibangun dan dijadikan kawasan industri dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019, yang mana Kementerian Perindustrian diamanatkan untuk membangun 14(empat belas) Kawasan Industri diluar Jawa. Program ini mengacu pada program Nawacita dari Presiden Jokowi yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran, juga untuk memperkuat peran pemerintah dalam pembangunan nasional. Program *Quick Win* percepatan industri yang dimotori Sirektorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri menjadikan Jorong sebagai Kawasan Industri Prioritas yang akan dibangun diluar Jawa.

Salah satu pertimbangan dijadikannya Kawasan Jorong sebagai salah satu kawasan industri karena di Jorong lahan kawasan industri telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan di kawasan ini telah ada *anchor* industri yakni PT Gunung Prima dan PT Delta Prima Steel yang bergerak dibidang industri baja dan turunannya.

## 2.4 Sumber Daya Industri

### 2.4.1 Bidang-Bidang Industri Potensial

Sektor industri merupakan salah satu sektor andalan dalam menopang perekonomian di daerah. Berdasarkan data yang diperoleh di Kabupaten Tanah Laut terdapat 3 (tiga) kelompok industri yaitu industri hasil pertanian dan kehutanan, industri logam mesin dan kimia, dan industri aneka baik perusahaan industri formal (berizin) dan non formal.

**Tabel 2.10**  
**Jumlah Perusahaan Industri Formal (Berizin)**

No	Kelompok Industri	Industri Formal			Tenaga Kerja		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015
1.	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IPHK)	51	71	80	153	211	554
	Industri Logam Mesin dan Kimia (ILMK)	20	21	21	60	63	115
	Industri Aneka	5	5	19	15	15	83
		<b>76</b>	<b>97</b>	<b>120</b>	<b>228</b>	<b>289</b>	<b>752</b>

*Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka Tahun 2014 dan Tahun 2016*

**Tabel 2.11**  
**Jumlah Perusahaan Industri Non Formal**

No	Kelompok Industri	Industri Non Formal		Tenaga Kerja	
		2014	2015	2014	2015
1.	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IPHK)	706	758	2118	2497
	Industri Logam Mesin dan Kimia (ILMK)	486	501	1458	1561
	Industri Aneka (IA)	135	145	405	554
	<b>Jumlah</b>	<b>1327</b>	<b>1404</b>	<b>3981</b>	<b>4612</b>

*Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka Tahun 2016*

**Tabel 2.12**  
**Jumlah Industri Yang Berizin Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Perusahaan		Tenaga Kerja	
		2014	2015	2014	2015
1.	Panyipatan	20	21	60	69
2.	Takisung	8	9	24	27
3.	Kurau	2	2	4	8
4.	Bumi Makmur	2	2	6	7
5.	Bati-Bati	8	8	24	30
6.	Tambang Ulang	3	6	9	18
7.	Pelaihari	36	38	108	118
8.	Bajuin	5	5	15	20
9.	Batu Ampar	5	5	15	20
10.	Jorong	3	3	9	15
11.	Kintap	5	5	15	20
	<b>Jumlah</b>	<b>97</b>	<b>102</b>	<b>289</b>	<b>351</b>

*Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka Tahun 2016*

Selain itupula di Kabupaten Tanah Laut khususnya Kecamatan Jorong akan dikembangkan menjadi kawasan industri karena wilayah ini merupakan kawasan strategis di Provinsi Kalimantan Selatan. Kawasan industri Jorong nantinya akan terintegrasi dengan Pelabuhan Swarangan Pelaihari untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri di wilayah tersebut.

Kawasan industri baru yang nantinya akan dibangun memiliki total luas sebesar 6.370 ha yang dibagi menjadi empat blok kawasan industri. Pada tahap pertama pengembangan kawasan industri Jorong diprioritaskan membangun blok I seluas 915 ha yang diperuntukkan untuk industri biji besi dan baja, dengan mendirikan satu hingga enam perusahaan industri bijih besi dan baja.

Pada dasarnya pengolahan biji besi dan baja dapat di bagi menjadi dua industri besi baja hulu dan industry besi baja hilir.

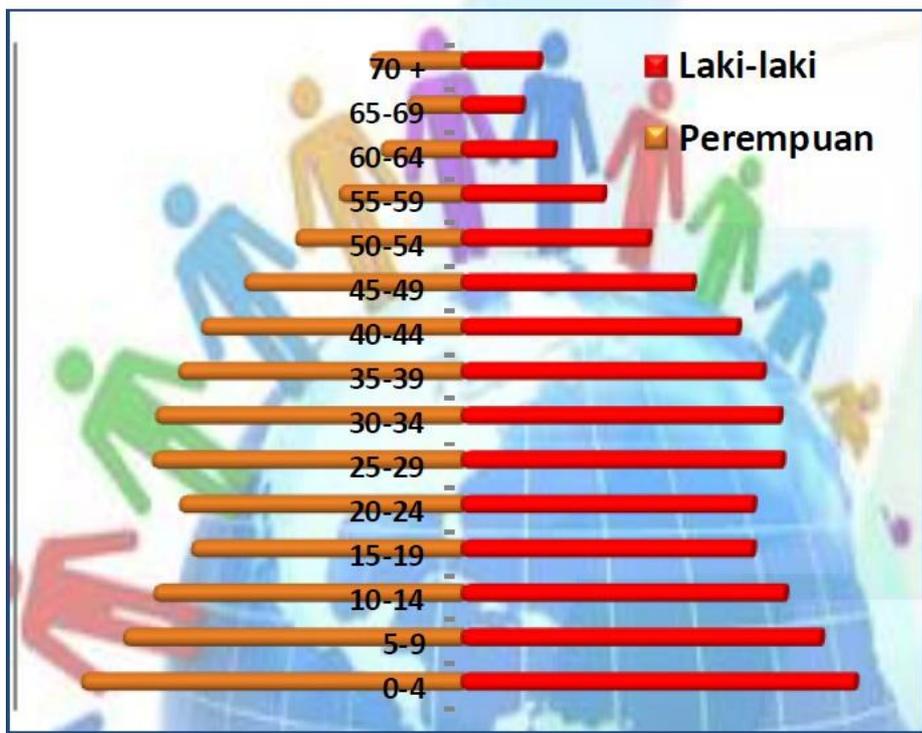
Industri besi baja hulu dimulai dari proses hasil tambang berupa pasir besi menjadi bijih besi (*iron ore*) dan dilanjutkan menjadi *pellet* yang merupakan bahan baku untuk pembuatan besi baja. Selanjutnya diproses lagi pada tanur baja untuk menghasilkan produk baja antara yang menghasilkan bahan baku bagi industry hilirnya sebagai produk akhir. Industry baja sendiri merupakan industry yang bersifat padat modal, padat teknologi dan memerlukan SDM yang trampil dan ahli dalam merencanakan proses produksi dan pengaturan mesin secara optimal dan efisien.

Di Tanah Laut sudah berdiri perusahaan bijih besi dan baja khususnya di Kecamatan Jorong diantaranya PT Delta Prima Steel, PT Semeru Surya Steel dan PT JBG. Sedangkan perusahaan yang melakukan pengolahan biji besi menjadi besi spons (*sponge iron*) yakni PT Delta Prima Steel dengan kapasitas produksi sebesar 100 ton.

#### 2.4.2 Sumberdaya Manusia

Gambar 2.9

#### Piramida Penduduk Tanah Laut 2015



Penduduk Tanah Laut pada tahun 2015 berdasarkan hasil proyeksi penduduk berjumlah 324.283 jiwa, dimana sekitar 51 persennya adalah berjenis kelamin laki-laki. Bila dilihat dari sebaran penduduknya, Tanah Laut dengan luas wilayah sekitar 3.631,35 km<sup>2</sup> ditempati penduduk sebanyak 89 orang per km<sup>2</sup>. Sementara komposisi penduduk bila dilihat dari segi kelompok umur, maka terdapat sekitar 66,56 persen yang berusia produktif antara 15–64 tahun dengan angka Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) sebesar 50,24 persen. Artinya rata-rata setiap 100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) ternyata menanggung penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 64 tahun keatas) sebanyak 50 orang. Komposisi penduduk tidak hanya dapat dilihat dari segi umur, tetapi juga dari segi jenis kelamin. Di Tanah Laut, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Hal ini dapat ditunjukkan dari besaran *sex ratio* yang bernilai di atas 100. Pada tahun 2015, nilai *sex ratio* yang sebesar 105,56 berarti untuk setiap 100 perempuan terdapat 105 laki-laki.

**Gambar 2.10**

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**



Pencapaian keberhasilan pembangunan manusia khususnya dari aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi dapat diidentifikasi dari besaran indikator indeks pembangunan manusia (IPM). Aspek pendidikan diwakili oleh Harapan Lama Sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS), aspek kesehatan diwakili oleh angka harapan hidup (AHH) dan aspek ekonomi dipresentasikan oleh kemampuan daya beli (PPP).

**Gambar 2.11**

**Perkembangan IPM Tanah Laut, 2013-2015**



Sumber: BPS RI

**Tabel 2.13**

**Perbandingan IPM dan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, 2015**

Kabupaten	IPM	Jumlah Penduduk (jiwa)
(1)	(2)	(3)
Tanah Laut	66,99	324.283
Kotabaru	66,61	320.208
Banjar	66,39	554.443
Barito Kuala	63,53	298.282
Tapin	67,67	181.778
HSS	66,31	227.153
HST	66,56	260.292
HSU	62,49	225.386
Tabalong	69,35	239.593
Tanah Bumbu	67,58	325.115
Balangan	65,34	123.449
Banjarmasin	75,41	675.440
Banjarbaru	77,56	234.371
Kalimantan Selatan	68,38	3.989.793

Sumber: BPS RI

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan pencapaian keberhasilan pembangunan manusia di Tanah Laut tahun 2015 mencapai 66,99 persen. Angka ini sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2014 dimana angka IPM Tanah Laut pada tahun tersebut sebesar 66,50 persen. Angka harapan hidup (AHH) Tanah Laut pada tahun 2015 capaiannya berada pada kisaran usia 68,62 tahun. Dengan kisaran idealnya usia 25 - 85 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa umur panjang dan sehat penduduk Tanah Laut masih belum mencapai umur maksimal 85 tahun. Meskipun demikian angka ini masih lebih besar dari AHH Provinsi Kalimantan Selatan yang hanya mencapai 67,80 tahun. Indeks pendidikan masyarakat dapat dilihat dari indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Untuk HLS, Tanah Laut berada di angka 11,25 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah mencapai 7,29 tahun. Standar hidup layak dapat dilihat dari pengeluaran perkapita. Tahun 2015 pengeluaran riil per kapita Tanah Laut mengalami sedikit peningkatan, dari Rp. 10,632 juta menjadi Rp. 10,753 juta per kapita per tahunnya.

### **2.4.3 Sumberdaya Alam**

Sektor pertanian tanaman pangan memiliki peranan yang penting dan strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk maka peningkatan kebutuhan pangan juga terus meningkat. Kenyataan ini menuntut pemerintah untuk senantiasa memprioritaskan upaya peningkatan produksi tanaman pangan.

Padi merupakan salah satu bahan makanan pokok yang dihasilkan oleh Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2015, Kabupaten Tanah Laut mampu memproduksi padi sebanyak 197.115 ton. Hasil ini mengalami peningkatan sebesar 4,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara produksi ubi jalar naik signifikan dari 1.746 ton (2014) menjadi 2.458 ton pada tahun 2015 atau sebesar 40,78 persen.

Jika ditinjau dari produktivitasnya, ubi kayu juga

merupakan tanaman palawija yang paling tinggi produktivitasnya yaitu mencapai 178,06 kuintal per hektar. Hal yang sama juga dialami oleh ubi jalar, dimana produktivitasnya mencapai 153,63 kuintal per hektar. Namun produktivitas yang cukup tinggi ini tidak diimbangi dengan kenaikan produksinya. Produksi ubi kayu ternyata mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan berkurangnya luas tanam dan luas panen.

**Tabel 2.14**

**Produksi Tanaman Pangan Tanah Laut,  
Tahun 2013-2015**

Tanaman	Produksi (ton)		
	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Padi	187 758	188 189	197 115
Jagung	80 055	80 108	77 324
Kedelai	981	2 276	2 545
Kacang Tanah	805	1 133	965
Kacang Hijau	90	142	82
Ubi Kayu	25 898	22 125	20 156
Ubi Jalar	2 694	1 746	2 458

Sumber: Tanah Laut Dalam Angka 2016

**Gambar 2.12**

**Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan (Ton)  
di Tanah Laut Tahun 2015**

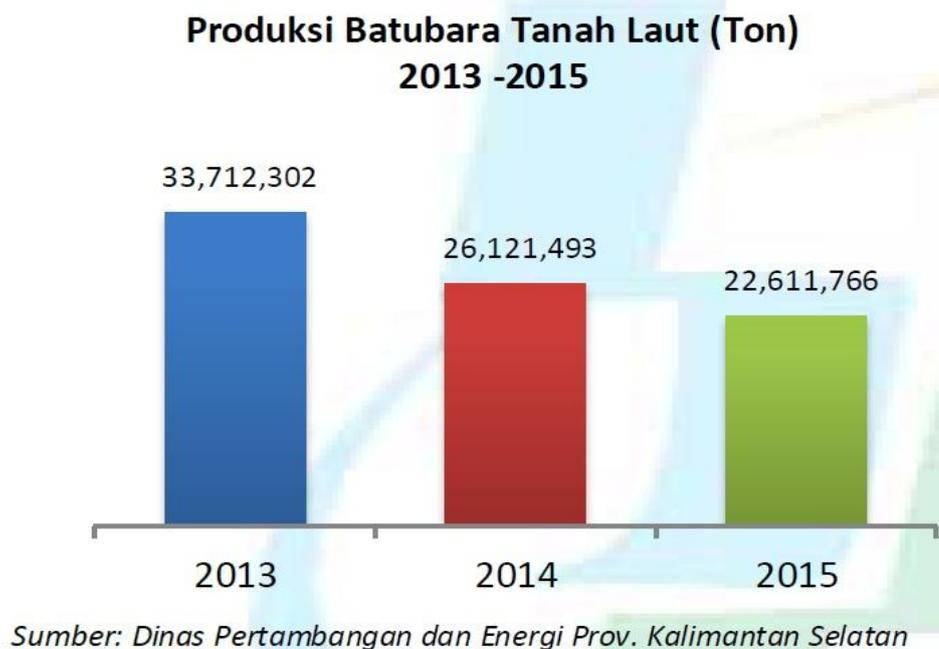


Sumber : Tanah Laut Dalam Angka 2016

**Gambar 2.13**



**Gambar 2.14**



**Tabel 2.15**

Jenis Ternak	Populasi (ekor)		
	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Ternak Besar</b>			
Sapi Potong	51 190	56 571	61 225
Sapi Perah	45	13	11
Kerbau	2 785	3 265	3 280
<b>Ternak Kecil</b>			
Kambing	14 072	14 829	14 797
Domba	305	292	244
<b>Ternak Unggas</b>			
Ayam Ras Petelur	2 777 266	4 023 256	5 244 362
Ayam Ras Pedaging	21 970 607	26 438 945	49 061 691
Ayam Buras	1 205 061	1 686 487	2 210 147
Itik	227 585	267 505	256 511

*Sumber: Tanah Laut Dalam Angka 2016*

#### 2.4.4 Sumberdaya Pendukung

Teknologi informasi dan komunikasi mempermudah kehidupan manusia. Jika menggunakan alat teknologi informasi dan komunikasi, dua benua akan terasa tidak berjarak. Kehadiran komputer, internet, telepon seluler, dan berbagai alat teknologi informasi dan komunikasi membuat arus informasi semakin lancar. Perkembangan teknologi informasi di Tanah Laut menunjukkan fenomena yang meningkat. Hal ini terlihat dari jumlah pengguna internet *speedy* yang mengalami peningkatan selama tahun 2014-2015.

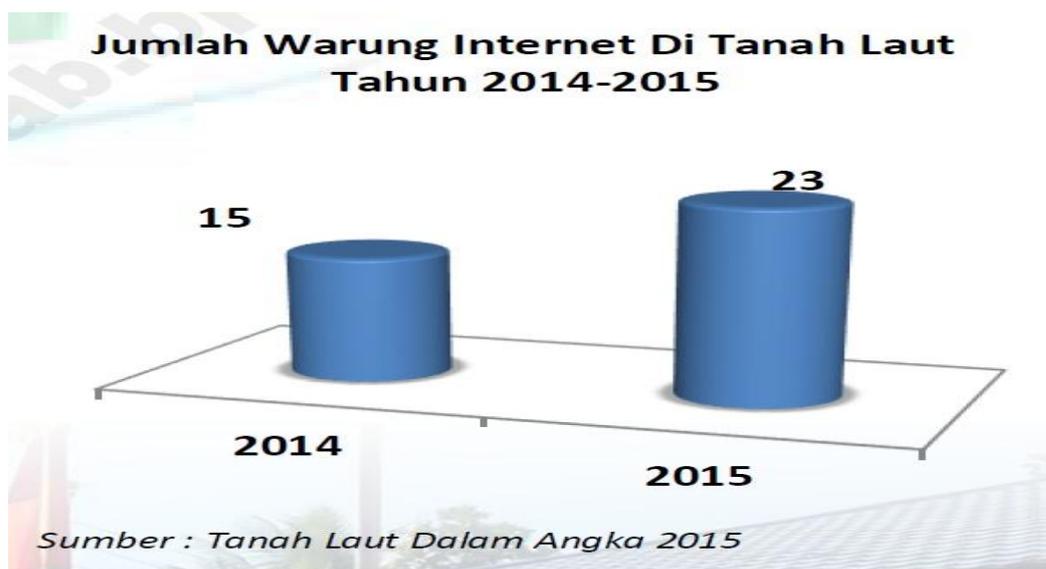
Untuk pengguna internet *speedy* terjadi kenaikan mencapai sebesar 12 persen yaitu menjadi 937 pengguna di tahun 2015. Keberadaan telepon selular yang marak belakangan ini ternyata tidak memberi dampak pada berkurangnya pelanggan telepon konvensional. Hal ini terlihat dari naiknya pemakaian telepon konvensional yang bertambah menjadi sebanyak 155 pengguna. Sebagian besar pengguna telepon ini adalah instansi pemerintahan ataupun pelaku usaha.

Jumlah warung internet pada tahun 2015 juga menunjukkan fenomena yang sama, dimana terjadi kenaikan sebesar 53 persen. Keberadaan Kantor Pos sebagai penyedia jasa pengiriman surat-menyurat ternyata masih diperlukan. Kecanggihan teknologi dan menjamurnya jasa pengiriman milik swasta tidak meruntuhkan dominasi kantor pos. Apalagi sekarang kantor pos tidak sekedar melayani jasa pengiriman barang namun sudah menjadi lembaga keuangan non bank. Di Tanah Laut pada tahun 2015 ada 8 kantor pos, 1 rumah pos dan 7 agen pos yang bertugas dalam jasa pengiriman barang.

**Gambar 2.15**



**Gambar 2.16**



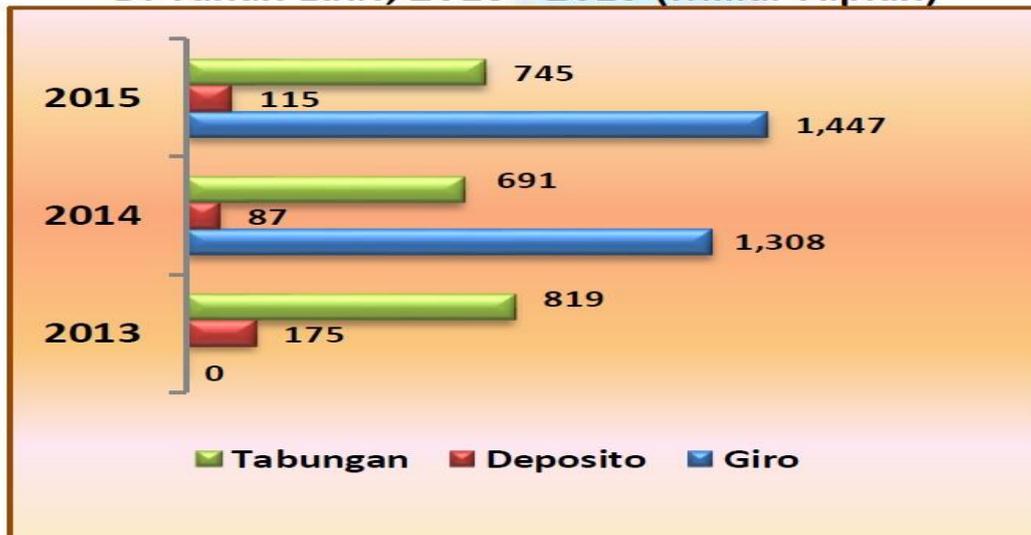
**Tabel 2.16**  
**Jumlah Objek Wisata di Kabupaten Tanah Laut**

No.	Nama Obyek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata	Aksesibilitas (dari Kota Pelaihari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pantai Takisung	Takisung, Takisung	Pantai	22 km
2	Pantai Batakan	Batakan, Panyipatan	Pantai	40 km
3	Pantai Swarangan	Swarangan, Jorong	Pantai	41 km
4	Pantai Batu Lima	Kuala Tambangan, Takisung	Pantai	42 km
5	Air Terjun Bajuin	Sungai Bakar, Pelaihari	Alam	10 km
6	Air Terjun Balangdaras	Tanjung, Pelaihari	Alam	25 km
7	Air Terjun Hamindrai	Tanjung, Pelaihari	Alam	17 km
8	Air Terjun Habulu	Tanjung, Pelaihari	Alam	18 km
9	Gunung Kayangan	Ambungan, Pelaihari	Alam	6 km
10	Gunung Keramaian	Ujung Batu, Pelaihari	Alam	9 km
11	Bukit Sanghiyang	Gunung Makmur, Takisung	Alam	16 km
12	Kawasan Goa Marmar	Sungai Bakar, Pelaihari	Alam	10 km
13	Goa Macan/Liang Babau	Tanjung, Pelaihari	Alam	19 km
14	Kerbau Rawa	Benua Raya, Bati-Bati	Alam	26 km
15	Benteng Belanda Tabanio	Tabanio, Takisung	Sejarah	25 km
16	Pulau Datu Pamulutan	Tanjung Dewa, Panyipatan	Ziarah	38 km
17	Datu Insad	Sambangan, Bati-Bati	Ziarah	33 km
18	Taman Mina Tirta	Angsau, Pelaihari	Buatan	1 km
19	Taman Hutan Kota	Pelaihari, Pelaihari	Buatan	1 km
20	Air Terjun Lalaran	Pamalongan, Bajuin	Alam	14 km
21	Bekantan	Swarangan, Jorong	Sungai	39 km
22	Bekantan	Panjaratan, Pelaihari	Sungai	15 km
23	Makam Keramat Istana	Karang Taruna, Pelaihari	Ziarah	6 km
24	Taman Kijang Kencana	Pelaihari, Pelaihari	Buatan	1 km
25	Bumi Perkemahan	Sungai Jelai, Tambang Ulang	Agrowisata	9 km

Sumber: Tanah Laut dalam Angka, 2016

Gambar 2.17

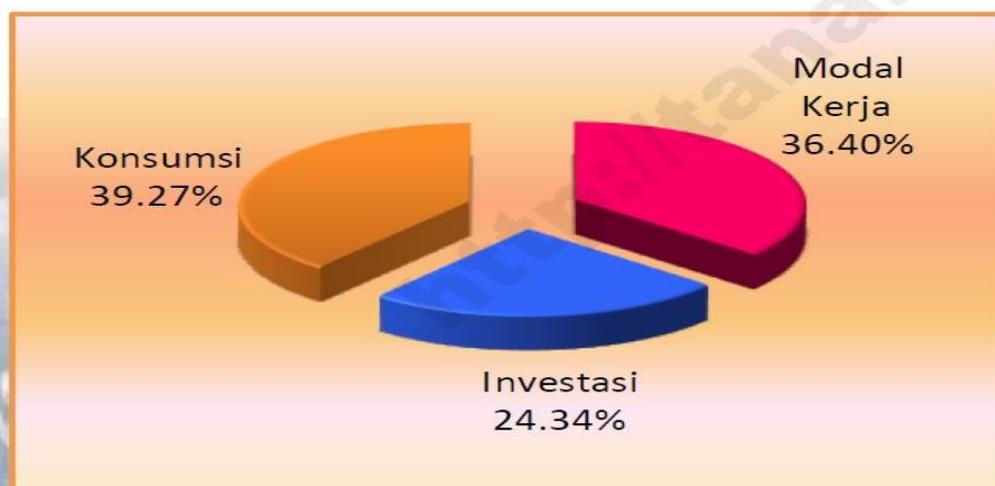
Posisi Simpanan Masyarakat Menurut Jenis Simpanan Di Tanah Laut, 2013 - 2015 (Miliar rupiah)



Sumber : Bank Indonesia 2016

Gambar 2.18

Persentase Pinjaman Masyarakat Menurut Jenis Penggunaan di Tanah Laut Tahun 2015 (%)



Sumber : Bank Indonesia 2016

## **2.5 Analisis Potensi Unggulan**

### **2.5.1 Analisis LQ**

Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki suatu daerah yaitu sektor-sektor mana yang merupakan sektor basis (basic sektor) dan sektor mana yang bukan sektor basis (non basic sektor). Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan satu sektor antara daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas. Perbandingan relatif ini dapat dinyatakan secara matematika sebagai berikut (Warpani 2001):

$$LQ = \frac{Si/s}{Ni/N}$$

#### **Keterangan:**

- LQ : Nilai Location Quotient
- Si : PDRB Sektor i di Kabupaten
- S : PDRB total di Kabupaten
- Ni : PDB Sektor i Provinsi Kalimantan Selatan
- N : PDB total di Provinsi Kalimantan Selatan

Satuan yang dapat digunakan untuk menghasilkan koefisien dapat menggunakan satuan jumlah buruh, atau hasil produksi atau satuan lain yang dapat digunakan sebagai kriteria (Warpani, 2001). Apabila hasil perhitungannya menunjukkan  $LQ > 1$ , berarti merupakan sektor basis dan berpotensi untuk ekspor, sedangkan  $LQ < 1$ , berarti bukan sektor basis (sektor lokal/impur). Teknik ini memiliki asumsi bahwa semua penduduk di suatu daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan nasional (regional). Bahwa produktivitas tiap pekerja di setiap sektor industri di daerah adalah sama dengan produktivitas pekerja dalam industri nasional. Setiap industri menghasilkan barang yang homogen pada setiap sektor dan bahwa perekonomian bangsa yang bersangkutan adalah suatu perekonomian tertutup.

Analisis LQ memiliki kelebihan antara lain merupakan alat

analisis sederhana yang dapat menunjukkan struktur perekonomian suatu daerah dan industri substitusi impor potensial atau produk-produk yang bisa dikembangkan untuk ekspor dan menunjukkan industri-industri potensial (sektoral) untuk dianalisis lebih lanjut. Sedangkan kelemahannya antara lain merupakan indikator kasar yang deskriptif, merupakan kesimpulan sementara dan tidak memperhatikan struktur ekonomi setiap daerah. Analisis LQ ini juga digunakan untuk menghitung potensi produk unggulan dari hasil pemanfaatan sumber daya alam pada sektor-sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pariwisata pada beberapa wilayah dan dapat diketahui wilayah mana yang paling potensi untuk produk-produk tertentu sehingga dapat ditetapkan sebagai wilayah/daerah basis atau non basis.

#### **a. Model LQ Sektor Basis PDRB**

Pembahasan mengenai model basis ekonomi diarahkan untuk memahami bagaimana suatu wilayah sebagai bagian dari suatu wilayah yang lain dapat terbentuk, dan berbagai aktivitas yang menyertai dari pembentukan dan pengisian kabupaten. Analisis ini dapat juga dijadikan sebagai landasan bagi analisis pengembangan potensi sektor ekonomi di suatu wilayah.

Analisis LQ pada Kabupaten Tanah Laut diterapkan dengan membandingkan aktivitas perekonomian (PDRB) Tanah Laut dengan aktivitas perekonomian (PDRB) Provinsi Kalimantan Selatan. Tabel berikut merupakan hasil perhitungan besaran nilai LQ per sektor dalam perekonomian Tanah Laut untuk tahun 2011 sampai dengan 2015.

**Tabel 2.17**

**Perhitungan Besaran Nilai LQ per Sektor dalam Perekonomian Tanah Laut**

No	Sektor	Nilai LQ					Rata-Rata
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.27	1.27	1.29	1.28	1.30	1.28
2	Pertambangan dan Penggalian	1.20	1.22	1.22	1.21	1.21	1.21
3	Industri Pengolahan	0.79	0.79	0.81	0.83	0.85	0.81

No	Sektor	Nilai LQ					Rata-Rata
		2011	2012	2013	2014	2015	
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.57	0.57	0.57	0.59	0.59	0.58
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.42	0.42	0.43	0.43	0.44	0.43
6	Konstruksi	0.84	0.84	0.85	0.86	0.88	0.86
7	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.05	1.03	1.04	1.07	1.09	1.06
8	Transportasi dan Pergudangan	0.89	0.88	0.87	0.89	0.91	0.89
9	Penyediaan akomodasi dan Makanan Minuman	0.73	0.71	0.72	0.73	0.75	0.73
10	Informasi dan Komunikasi	0.80	0.80	0.80	0.81	0.83	0.81
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.41	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40
12	Real Estate	0.85	0.85	0.85	0.87	0.88	0.86
13	Jasa Perusahaan	0.47	0.47	0.48	0.49	0.50	0.48
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib	0.86	0.86	0.86	0.88	0.89	0.87
15	Jasa Pendidikan	0.80	0.79	0.80	0.81	0.83	0.81
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.50	0.49	0.51	0.52	0.53	0.51
17	Jasa Lainnya	0.59	0.59	0.60	0.60	0.61	0.60
	LQ PDRB Sektor Tala	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber: BPS Tanah Laut, 2016 (diolah)

Dari tabel di atas terlihat nilai LQ-nya sektor dapat ditunjukkan bahwa pada tahun 2015 dan nilai rata-rata per tahun, Kabupaten Tanah Laut memiliki sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dan Pertambangan dan Penggalian, Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang bisa menjadi andalan (basis) bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan karena memiliki nilai di atas 1 (satu) dan sektor lainnya memiliki nilai di bawah 1 yang bukan merupakan sektor basis. Dengan demikian sektor andalan (basis) yang primer untuk dapat dikembangkan ke industri adalah Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dan Pertambangan dan Penggalian karena sektor lainnya adalah sektor tersier atau jasa.

#### **b. Model LQ Sub Sektor Basis PDRB**

Hasil perhitungan besaran nilai LQ yang dapat menjadi andalan (Basis) yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

dan industri pengolahan. Besaran Nilai LQ Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam perekonomian Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat menjadi sektor andalan (basis) berdasarkan kontribusi sub sektor yang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.18**

**Hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Pertanian  
di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011-2015**

No	Sektor/Industri	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.27	1.27	1.29	1.28	1.30	1.28
	<i>Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian</i>	<i>1.11</i>	<i>1.11</i>	<i>1.12</i>	<i>1.10</i>	<i>1.12</i>	<i>1.11</i>
	a. Tanaman Pangan	1.00	1.00	1.04	1.01	1.02	1.01
	b. Tanaman Hortikultura	0.53	0.52	0.53	0.54	0.55	0.53
	c. Tanaman Perkebunan	11.31	1.13	1.11	1.10	1.12	3.15
	d. Peternakan	1.42	1.45	1.47	1.50	1.52	1.47
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	1.17	1.13	1.15	1.15	1.16	1.15
	<i>Kehutanan dan Penebangan Kayu</i>	<i>3.69</i>	<i>3.69</i>	<i>3.75</i>	<i>3.88</i>	<i>3.94</i>	<i>3.79</i>
	<i>Perikanan</i>	<i>1.38</i>	<i>1.38</i>	<i>1.40</i>	<i>1.41</i>	<i>1.43</i>	<i>1.40</i>

Sumber: BPS Tanah Laut, 2016 (diolah)

Berdasarkan 54able di atas terlihat dari nilai LQ-nya Sub 54 able 54 , dapat ditunjukkan bahwa rata-rata sub 54 able 54 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian menjadi andalan (basis) dengan rata-rata nilai LQ 1,11% dengan kontribusi nilai tanaman pangan, tanaman Hortikultura, Peternakan, Jasa Pertanian dan Perburuan. Kemudian Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu memberikan kontribusi yang paling tinggi yaitu dengan rata-rata nilai LQ 3,79%. Selanjutnya untuk sub 54 able 54 Perikanan memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap 54 able 54 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu 1,40%. Selanjutnya Hasil perhitungan besaran nilai LQ 54 able 54 Pertambangan dan Penggalan dalam perekonomian Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2011 sampai dengan 2015 maka dapat diketahui bahwa yang dapat menjadi

sub 55 able 55 andalan (basis) Sektor 55 able 55 ry pengolahan disajikan pada 55able berikut:

Tabel 2.19

Hasil perhitungan besaran nilai LQ sektor Pertambangan dan Penggalian Tanah Laut

No	Sektor/Industri	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata
<b>2</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	1.20	1.22	1.22	1.21	1.21	1.21
	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pertambangan Batubara dan Lignit	1.22	0.12	1.23	1.22	1.21	1.00
	Pertambangan bijih logam	1.90	1.93	1.95	1.99	2.12	1.98
	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1.49	1.48	1.50	1.52	13.65	3.93

Sumber: BPS Tanah Laut, 2016 (diolah)

Dari tabel di atas terlihat dari nilai LQ-nya Sub sektor, dapat ditunjukkan bahwa rata-rata sub sektor yang dapat menjadi basis (andalan) yaitu sub sector Pertambangan bijih logam, dengan rata-rata nilai LQ 1,98 dan sub sector Pertambangan dan Penggalian Lainnya dengan rata-rata nilai LQ 3,93.

Selanjutnya Hasil perhitungan besaran nilai LQ sektor sektor industri pengolahan dalam perekonomian Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2011 sampai dengan 2015 maka dapat diketahui bahwa yang dapat menjadi sub sektor andalan (basis) Sektor industri pengolahan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.20**

**Hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011-2015**

No	Sektor/Sub Sektor	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata
<b>1</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	0.79	0.79	0.81	0.83	0.85	0.81
<b>2</b>	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-	-
	<b>Industri Makanan dan Minuman</b>	<b>1.09</b>	<b>1.09</b>	<b>1.12</b>	<b>1.14</b>	<b>1.16</b>	<b>1.12</b>
	Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-	-

No	Sektor/Sub Sektor	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata
	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	-	-	-	-	-	-
	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11
	Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14
	Industri kimia, farmasi dan obat tradisional	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	Industri karet, barang dari karet dan plastik	0.54	0.54	0.56	0.57	0.58	0.55
	Industri Barang Galian bukan Logam	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
	Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-	-
	Industri Barang Logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
	Industri Mesin dan Perlengkapan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Industri Alat Angkutan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Industri Furnitur	0.37	0.36	0.36	0.37	0.38	0.37
	Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0.33	0.33	0.34	0.34	0.35	0.34

Sumber: BPS Tanah Laut, 2016 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, maka hasil perhitungan LQ secara keseluruhan rata-rata sektor industri pengolahan yaitu 0,81 yang berarti belum dapat dijadikan sektor andalan (basis). Hal ini menggambarkan bahwa sector indutri pengolahan masih sangat bergantung kurang berkembang. Sub sektor yang memiliki rata-rata nilai LQ lebih dari 1 yaitu sub sektor Industri Makanan dan Minuman yang memiliki rata-rata nilai LQ 1,12.

### 2.5.2 Analisis Shift Share Klasik

Analisis *Shift Share* Klasik digunakan untuk menganalisis factor-faktor yang meyebabkan terjadinya perubahan ekonomi daerah terhadap struktur ekonomi regional sehingga dapat diketahui kinerja perekonomian di suatu daerah. Analisis *Shift Share* ini menggunakan indikator: (1) bila komponen pertumbuhan proporsional (**Mij**) suatu sektor > 0, maka sektor bersangkutan

mengalami pertumbuhan yang cepat dan memberikan pengaruh positif kepada perekonomian wilayah, begitu pula sebaliknya; (2) bila komponen daya saing (**Cij**) suatu sektor > 0, maka keunggulan komparatif dari suatu sektor tersebut meningkat dalam perekonomian wilayah yang lebih luas, begitu pula sebaliknya. Hasil-hasil pengolahan analisis *Shift Share* di Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.21**  
**Hasil-hasil pengolahan analisis *Shift Share* di Tanah Laut**

No	Sektor	Komponen Pertumbuhan	Komponen Bauran Industri	Komponen Keunggulan Kompetitif	PDRB
		(Nij)	(Mij)	(Cij)	(Dij)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	612,865.62	(34,270.15)	(57,917.69)	520,677.78
2	Pertambangan dan Penggalian	1,177,777.08	(1,028,676.83)	(111,338.11)	37,762.14
3	Industri Pengolahan	328,415.35	29,154.05	34,224.36	391,793.75
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,204.78	1,775.58	(133.72)	2,846.64
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,917.56	956.76	25.04	5,899.36
6	Konstruksi	181,847.25	93,223.09	(4,716.85)	270,353.49
7	Perdagangan Besar dan Eceran	247,683.55	183,443.90	(10,937.03)	420,190.43
8	Transportasi dan Pergudangan	146,456.86	105,791.79	(15,926.55)	236,322.10
9	Penyediaan akomodasi dan Makanan Minuman	39,041.15	17,882.61	(2,491.25)	54,432.51
10	Informasi dan Komunikasi	77,668.49	19,911.04	(2,666.13)	94,913.40
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	35,243.99	33,486.22	(9,668.23)	59,061.98
12	Real Estate	55,205.03	15,155.62	(1,730.62)	68,630.02
13	Jasa Perusahaan	7,756.52	5,720.63	(118.26)	13,358.89
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib	137,939.24	120,469.11	(3,919.45)	254,488.90
15	Jasa Pendidikan	94,922.45	66,630.34	(7,068.17)	154,484.62
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	23,741.92	19,893.35	585.30	44,220.57
17	Jasa Lainnya	19,057.19	8,311.45	(731.46)	26,637.18
	Total	3,191,744.02	(341,141.44)	(194,528.82)	2,656,073.76

Sumber: BPS Tanah Laut, 2016 (diolah)

**a) Komponen Pertumbuhan (*Nij*)**

Pertumbuhan ekonomi Propinsi Kalimantan Selatan telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut sebesar 3,191,744.02 juta rupiah. Namun, sebenarnya perkembangan PDRB Kabupaten Tanah Laut berjumlah sebesar 2,656,073.76 juta rupiah. Hal ini dikarenakan masih ada dua komponen lain yang memberikan pengaruh yaitu bauran industri dan keunggulan kompetitif.

Tiga penyumbang terbesar adalah sector Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (612,865.62 juta rupiah), Sektor Pertambangan dan Penggalian (1,177,777.08 juta rupiah), dan Sektor Industri pengolahan (328,415.35 juta rupiah). Semua sektor menunjukkan pertumbuhan positif yang berarti pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanah Laut lebih cepat dibandingkan PDRB Propinsi Kalimantan Selatan.

**b) Komponen Bauran Industri (*Mij*)**

Komponen bauran industri (*Mij*) menyatakan besar perubahan perekonomian wilayah akibat adanya bauran industri. Hasil analisis menunjukkan bahwa bauran industri memberikan pengaruh yang negatif bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Tanah Laut yaitu -341,141.44 juta rupiah. Nilai negatif mengindikasikan bahwa komposisi sektor pada PDRB Kabupaten Tanah Laut cenderung mengarah pada perekonomian yang akan tumbuh relatif lambat.

Sektor-sektor yang mendapat pengaruh bauran industri (nilai positif), yaitu sektor Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib. Sektor-sektor tersebut mempunyai tingkat daya pertumbuhan cepat dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan

**c) Komponen Keunggulan Kompetitif (*Cij*)**

Nilai keunggulan kompetitif yaitu -194,528.82 juta rupiah. Secara

agregat nilai positif ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Tanah Laut memiliki keunggulan kompetitif yang rendah bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Keunggulan kompetitif yang dihasilkan akan mempengaruhi perkembangan perekonomian Kabupaten Tanah Laut.

Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (technological progress). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah. Keunggulan komperatif bagi suatu komoditi bagi suatu negara atau daerah adalah bahwa komoditi itu lebih unggul secara relatif dengan komoditi lain di daerahnya. Pengertian unggul dalam hal ini adalah dalam bentuk perbandingan dan bukan dalam bentuk nilai tambah riil. Keunggulan komperatif adalah suatu kegiatan ekonomi yang secara perbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah. Sedangkan sektor unggulan adalah sektor yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat yang besar. Sektor unggulan juga memberikan nilai tambah dan produksi yang besar, memiliki multiplier effect yang besar terhadap perekonomian lain, serta memiliki permintaan yang tinggi baik pasar lokal maupun pasar ekspor.

**Tabel 2.22**  
**Analisis Model Shift-Share Pendekatan Proportional Shift (PS)**  
**dan Differential Shift (DS)**

No	Sektor/Industri	DS (Cij)	PS (Mij)	Tipologi	Keterangan
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(57,917.69)	(34,270.15)	IV	Kecepatan Pertumbuhan Terhambat, Kurang Berpotensi
2	Pertambangan dan Penggalian	(111,338.11)	(1,028,676.83)	IV	Kecepatan Pertumbuhan Terhambat, Kurang Berpotensi
3	Industri Pengolahan	34,224.36	29,154.05	I	Pertumbuhan Sangat Pesat
4	Pengadaan Listrik dan Gas	(133.72)	1,775.58	II	Pertumbuhan Terhambat Tapi Berkembang
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	25.04	956.76	I	Pertumbuhan Sangat Pesat
6	Konstruksi	(4,716.85)	93,223.09	II	Pertumbuhan Terhambat Tapi Berkembang
7	Perdagangan Besar dan Eceran	(10,937.03)	183,443.90	II	Pertumbuhan Terhambat Tapi Berkembang
8	Transportasi dan Pergudangan	(15,926.55)	105,791.79	II	Pertumbuhan Terhambat Tapi Berkembang
9	Penyediaan akomodasi dan Makanan Minuman	(2,491.25)	17,882.61	II	Pertumbuhan Terhambat Tapi Berkembang
10	Informasi dan Komunikasi	(2,666.13)	19,911.04	II	Pertumbuhan Terhambat Tapi Berkembang
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	(9,668.23)	33,486.22	II	Pertumbuhan Terhambat Tapi Berkembang
12	Real Estate	(1,730.62)	15,155.62	II	Pertumbuhan Terhambat Tapi Berkembang
13	Jasa Perusahaan	(118.26)	5,720.63	II	Pertumbuhan Terhambat Tapi Berkembang
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib	(3,919.45)	120,469.11	II	Pertumbuhan Terhambat Tapi Berkembang
15	Jasa Pendidikan	(7,068.17)	66,630.34	II	Pertumbuhan Terhambat Tapi Berkembang
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	585.30	19,893.35	I	Pertumbuhan Sangat Pesat
17	Jasa Lainnya	(731.46)	8,311.45	II	Pertumbuhan Terhambat Tapi Berkembang

Sumber: BPS Tanah Laut, 2016 (diolah)

### **BAB III**

## **VISI, MISI SERTA TUJUAN DAN SASARAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TANAH LAUT**

### **3.1 Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Tanah Laut**

Visi Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tanah Laut tahun 2005-2025 adalah

#### **TANAH LAUT SEBAGAI DAERAH INDUSTRI DAN PELABUHAN MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DIDASARI NILAI-NILAI AGAMA**

Visi pembangunan Kabupaten Tanah Laut tahun 2005–2025 itu pada dasarnya juga merupakan upaya pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur.

#### **Nilai-Nilai Agama diartikan sebagai :**

1. Suatu nilai yang senantiasa harus diyakini dan dijunjung tinggi, diamalkan serta diterapkan dalam segenap perilaku kehidupan oleh setiap insan anggota masyarakat di Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan yang dianutnya.
2. Suatu nilai yang akan membentuk insan anggota masyarakat yang beriman dan bertaqwa serta mempunyai kesalehan dan kepedulian sosial.
3. Suatu nilai yang akan mampu membentuk insan anggota masyarakat di Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai kecerdasan spritual.
4. Nilai-nilai agama juga harus dijadikan sumber motivasi, inspirasi dan pedoman oleh masyarakat Kabupaten Tanah Laut dalam setiap aspek kehidupan baik ekonomi, politik,

hukum, sosial, budaya, IPTEKS, lingkungan dan keamanan ketertiban. Oleh sebab itu, nilai-nilai agama harus dapat dijadikan “sumber energi” untuk menggerakkan proses pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut.

5. Nilai-nilai agama diartikan juga sebagai suatu nilai yang digunakan untuk menciptakan adanya keseimbangan dinamis antara dunia dan akherat, jasmani dan rohani, lahir dan bathin, serta material spiritual.

**Masyarakat sejahtera diartikan :**

1. Suatu kondisi masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan dan pengetahuan, kesehatan dan pendapatan yang tinggi dan merata serta memperoleh rasa aman dan senantiasa menjaga ketertiban.
2. Tingkat kemajuan masyarakat juga memperlihatkan kemampuan penggunaan dan penguasaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, mampu berkomunikasi dan bergaul dalam kesetaraan baik secara nasional maupun internasional.
3. Masyarakat sejahtera ini juga diartikan sebagai suatu kondisi masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang cukup makmur dengan indikator tingkat pendapatan per kapita minimal US \$ 3.000 per kapita pertahun pada tahun 2025 dan terdistribusi cukup merata; tingkat pengangguran dan kemiskinan yang rendah, mempunyai kesempatan berusaha yang sama antara golongan pengusaha mulai skala mikro, kecil, menengah sampai besar, terdapatnya kesetaraan gender, serta adanya fasilitas layanan sosial yang baik dan merata.
4. Pendekatan model pembangunan ekonomi menuju masyarakat sejahtera ini adalah pertumbuhan dengan pemerataan (*growth and equity*).
5. Untuk dapat mewujudkan Masyarakat sejahtera ini maka harus didukung oleh adanya tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga

masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan adalah masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang baik.

**Daerah Industri mengandung pengertian :**

1. Bahwa dalam periode 20 tahun mendatang Kabupaten Tanah Laut berhasil diwujudkan menjadi pusat industri di Kalimantan Selatan berbasis komoditi unggulan daerah yakni industri berbasis pertanian, kelautan, pertambangan dan pariwisata.
2. Daerah industri memberikan pengertian perlunya kepastian dan kontinunya suplai bahan baku yang diprioritaskan berasal dari produksi lokal.
3. Daerah industri memberikan pengertian perlu adanya proses pengolahan yang mampu memberi nilai tambah (*value added*) dalam bentuk yang sesuai dengan permintaan pasar serta sesuai standar mutu yang disyaratkan dengan harga yang bersaing.
4. Daerah industri memberikan pengertian harus adanya sistem distribusi yang baik sehingga mampu mendukung pemasaran produk sampai ke konsumen secara efektif dan efisien.
5. Daerah industri memberikan pengertian adanya pemberian kesempatan tumbuh dan berusaha yang seluas-luasnya kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta adanya kemudahan akses permodalan oleh para UMKM baik terhadap bank konvensional, bank syariah maupun lembaga keuangan non bank. Diperlukan peran pemerintah daerah dalam hal sertifikasi tanah / lahan guna memudahkan penjaminan kredit bagi pengusaha mikro dan kecil.
6. Daerah industri juga memberikan pengertian bahwa setiap investor baik asing, nasional maupun lokal merasa aman dan nyaman serta mendapat pelayanan yang profesional dalam berinvestasi.
7. Daerah industri juga memberikan pengertian bahwa keuntungan yang diperoleh Kabupaten Tanah Laut nantinya tidak hanya dari kegiatan produksi, pengolahan sampai

pemasaran produk saja tetapi juga dari *multiplier effect* yang timbul dari adanya kegiatan produktif tersebut.

8. Daerah industri juga memberikan pengertian bahwa masa mendatang, setiap kegiatan usaha oleh investor di Kabupaten Tanah Laut harus memberikan peluang kerjasama dan pembinaan kepada pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta koperasi.
9. Daerah industri juga memberikan pengertian bahwa teknologi yang digunakan tidaklah harus selalu menggunakan teknologi canggih (*high technology*) dengan biaya mahal, namun teknologi yang digunakan harus disesuaikan dengan permintaan pasar dimana produk itu akan dijual. Visi ini akan dicapai melalui penetapan misi serta ditempuh melalui tahapan-tahapan pembangunan dalam jangka waktu setiap 5 (lima) tahunan.

**Daerah Pelabuhan mengandung pengertian :**

1. Bahwa dalam periode 20 tahun mendatang telah berhasil diwujudkan dan beroperasinya suatu pelabuhan laut yang berstandar Internasional yang akan menjadi pintu masuk maupun keluar semua barang / produk baik faktor produksi maupun hasil industri (*output*) Kabupaten Tanah Laut maupun juga bagi daerah-daerah lain di Propinsi Kalimantan Selatan.
2. Daerah pelabuhan juga memberikan pengertian bahwa setiap pengusaha merasa aman dan nyaman serta mendapat pelayanan yang profesional dalam menggunakan fasilitas pelabuhan.
3. Daerah pelabuhan juga memberikan pengertian bahwa harus adanya kejelasan dan kepastian dalam pemberian pelayanan dengan prosedur, unit kerja yang berwenang, dan rincian biaya serta waktu penyelesaian yang jelas.
4. Perpaduan antara daerah industri berbasis pertanian, kelautan, pertambangan dan pariwisata dengan daerah pelabuhan ini diharapkan akan menjadikan Kabupaten Tanah Laut selain mampu tumbuh dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi diatas rata-rata Kalimantan Selatan; juga

diharapkan semakin meningkatkan daya saing serta mampu memelihara dan meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitifnya dengan daerah lain.

### **Misi**

Misi pada dasarnya adalah merupakan kondisi yang harus dipenuhi agar visi yang telah ditetapkan di atas dapat dicapai. Dengan kata lain; misi menunjukkan beberapa upaya utama pembangunan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanah Laut ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

1. Mewujudkan Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Nilai Nilai Agama.
2. Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan ketertiban serta penerapan sistem otonomi daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan masyarakat sejahtera.
4. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bertumpu pada pengembangan industri berbasis pertanian, perkebunan, kelautan, pertambangan, dan pariwisata.
5. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Pelabuhan Laut Berstandart Internasional.
6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang Berwawasan lingkungan dan Berkelanjutan.
7. Mewujudkan Penyiapan Prasarana Pembangunan Bandara,

### **3.2 Visi Pembangunan Industri Nasional**

**Visi Pembangunan Industri Nasional adalah “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”**

**Visi ini bercirikan:**

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
4. Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);
5. Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah;
6. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian

- fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
7. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
  8. Melakukan pembangunan industri hijau;
  9. Melakukan pembangunan industri strategis;
  10. Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
  11. Meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

### **3.3 Visi dan Misi Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan**

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka Visi Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka Visi Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

***“ Terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai Wilayah Industri yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Daerah pada Tahun 2037”***

Penjabaran makna dari visi di atas adalah sebagai berikut

#### **Industri**

Seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

**Maju** mengandung makna:

Bahwa masyarakat pada semua lapisan masyarakat maju dalam aspek kehidupan ekonomi, kemandirian bekerja dan berusaha untuk mencapai kehidupan yang sejahtera

#### **Berdaya Saing**

Daya saing adalah Kapasitas daerah untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional dan tetap menjaga atau meningkatkan pendapatan riil-nya.

#### **Sumber Daya**

Bahwa kokohnya ketahanan pilar-pilar pembangunan dan daya saing yang tinggi maupun kualitas sumberdaya manusia agar tercipta manusia yang kreatif dan mampu berinovasi dalam meningkatkan produktivitas yang kompetitif dalam persaingan global.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Provinsi Kalimantan Selatan mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya unggulan daerah yang efisien yang mampu mendukung industri komoditas unggulan.
2. Meningkatkan industri-industri hilir lanjutan yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk meningkatkan nilai tambah dan kompetensi industri daerah
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing
4. Mempercepat pembangunan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas industri

### **3.4 Tujuan Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan**

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

1. Tumbuh dan berkembangnya industry pengolahan berbasis sumber daya local.
2. Meningkatnya daya saing industry melalui penguatan inovasi dan teknologi.

### **3.5 Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan**

Sasaran pembangunan industri Provinsi Kalimantan Selatan yang dicapai pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2037 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan**  
**Tahun 2022 - 2037**

No	Sasaran	Tahun			
		2022	2027	2032	2037
1	Pertumbuhan sektor industri tanpa migas (%)	3,5%	4,0%	5,0%	6,0%
2	Kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB (%)	13,20%	13,25%	13,35%	13,45%
3	Nilai ekspor produk industri tanpa migas (Juta USD)	10.775	13.109	16.731	22.390
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas (orang)	307.496	374.116	477.477	638.972
5	Nilai Investasi sektor industri tanpa migas				
	a. Penanaman Modal Asing (Juta US \$)	76.77	105.25	163.29	255.13
	b. Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp. Milyar)	237.54	325.67	505.28	789.46

Sasaran kuantitatif di atas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen pemerintah provinsi Kalimantan Selatan untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan antara 6,0% (enam persen) sampai dengan 7,0% (tujuh persen) per tahun;
2. Perkembangan ekonomi nasional dan global yang dapat mendukung ekspor provinsi khususnya ekspor produk industri;
3. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
4. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. Kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung pelaksanaan peningkatan penggunaan teknologi

dan inovasi di sektor industri;

6. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
7. Koordinasi antar kementerian/lembaga/dinas dan peran aktif pemerintah daerah dalam pembangunan industri.

• **Dasar Perhitungan Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020-2035**

Dasar perhitungan sasaran pembangunan industri Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2022 - 2037 di atas adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Pertumbuhan Sektor Industri Tanpa Migas (%) 2022 - 2037

Sasaran pertumbuhan sektor industri tanpa migas tahun 2022 - 2037 untuk Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada pertumbuhan Industri tanpa Migas tahun 2014 yang mana pada tahun tersebut pertumbuhannya mencapai 3,5%. Dengan mempertimbangan masukan dari Daerah pada Focus Group Discussion (FGD)-2, tanggal 3 November 2015, maka sasaran pertumbuhan tanpa migas untuk tahun 2017-2027 di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 3.5% per tahun. Selanjutnya untuk tahun 2027-2037 diharapkan meningkat menjadi 4% ditahun 2027, 5% ditahun 2032 dan 6% ditahun 2037.

2. Kontribusi PDRB Industri Non-Migas

Dalam mencari kontribusi PDRB Industri Non-Migas terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022-2037, tentunya harus mengacu kepada pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut. Bilamana pertumbuhan ekonomi tahun 2022-2037 ditargetkan sebesar 3.5%-6.0%, maka target kontribusi sektor industri non Migas terhadap PDRB di tahun 2022, 2027, 2032 dan 2037 ditargetkan masing-masing 13,20%, 13,25%, 13,35% dan 13,45%.

3. Perkembangan Ekspor Tanpa Migas Provinsi Kalimantan Selatan 2017-2022

Mencari target pertumbuhan ekspor dengan cara mengalikan ekspor ditahun data terakhir tersedia dengan target pertumbuhan industri non migas tahun 2022-2037. Perkembangan ekspor dikalikan dengan target pertumbuhan sektor industri pertahun dari 2022-2037.

4. **Pertambahan Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri Non-Migas**

Mencari target pertambahan jumlah tenaga kerja di sektor industri non-migas dengan cara mengalikan jumlah tenaga kerja di sektor industri non-migas ditahun data terakhir tersedia dengan target pertumbuhan sektor industri non migas tahun 2022-2037. Perkembangan ekspor dikalikan dengan target pertumbuhan sektor industri pertahun dari 2022-2037.

5. **Target Investasi yang akan Ditanam di Provinsi Kalimantan Selatan 2017-2022**

Untuk mencari berapa investasi yang harus ditanam untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang ditetapkan, maka dalam kajian ini akan digunakan model Harrod-Domar. Model Harrod-Domar dibangun berdasarkan asumsi-asumsi:

- a. Perekonomian dalam kondisi full employment dan closed economy
- b. Tidak ada campur tangan pemerintah
- c. APS sama dengan MPS, dan MPS dianggap konstan
- d. Rasio stok kapital terhadap pendapatan dianggap tetap
- e. Tidak ada penyusutan barang kapital
- f. Tingkat harga umum konstan (upah riil = pendapatan riil)
- g. Tidak ada perubahan tingkat bunga

### **3.6 Visi dan Misi RPJM Daerah Kabupaten Tanah Laut 2013-2018**

#### **3.6.1 Visi dan Misi RPJMD**

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik, Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut terpilih tahun 2013-2018, visi pembangunan Kabupaten Tanah Laut 2013-2018 adalah

**VISI TANAH LAUT 2013- 2018:**

**TANAH LAUT BERKEMAJUAN, KAMPIUN, RELIGIUS,  
AKUNTABEL DAN TERUNGGUL (BERKARAKTER)**

Terjemahan Visi :

Tanah Laut berkemajuan, kampiun, religius, akuntabel, dan terunggul (**BERKARAKTER**) memiliki 5 (lima) Frase yang lebih terukur, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yaitu :

- **Berkemajuan :**

Masyarakatnya menjadi lebih maju dari sebelum Visi ini dibuat, baik secara ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Demikian juga lebih tenteram, aman, dan damai.

- **Kampiun :**

Masyarakatnya akan selalu berusaha untuk menjadi pemenang di tengah persaingan global yang sangat kompetitif untuk meningkatkan kesejahteraannya. Adanya perdagangan bebas dunia, seperti : AFTA, NAFTA, APEC, dan GATT tidak akan membuat masyarakat menjadi penonton, tetapi harus ikut menjadi pemain dan / atau pelaku yang secara bertahap harus menjadi pemenang.

- **Religius :**

Masyarakatnya taat menjalankan syariat agama. Beragama tentunya tidak hanya pada tataran simbolisme dan normatif semata, tetapi diusahakan untuk lebih optimal lagi mewarnai praktek-praktek bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat.

- **Akuntabel :**

Pelaksanaan Pemerintahan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemegang mandat tertinggi yaitu masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah penilaian tata kelola keuangan yang harus secepatnya bergerak dari

opini wajar dengan pengecualian (WDP) menuju wajar tanpa pengecualian (WTP).

- **Terunggul :**

Semua kemajuan, kemenangan, kereljiusan, dan keakuntabelan bisa terus dipertahankan di masa-masa yang akan datang untuk menyongsong Tanah Laut menjadi daerah industri dan pelabuhan. Minimal beberapa sarana dan prasarana kearah itu sudah bisa disiapkan sampai dengan tahun 2018.

Penyusunan visi dimaksud tentunya dibuat setelah memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025. Begitu juga dengan keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2008-2013. Semua regulasi yang berlaku akan dijadikan acuan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk juga dengan memperhatikan kedudukan Kabupaten Tanah Laut sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan dan dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang tidak kalah pentingnya adalah kedudukan Tanah Laut sebagai bagian dari masyarakat global tentu juga memperhatikan millineum development goals(MDG's). yang lebih penting lagi adalah dengan melakukan penjarangan aspirasi masyarakat dan diskusi intensif dengan beberapa pemangku kepentingan (stakeholders) di Kabupaten Tanah Laut, seperti : tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh remaja puteri, dan lain-lain. Secara sosiologis visi tersebut tentu saja tidak hanya berdimensi ekonomi, namun juga mencakup dimensi sosial, budaya, hukum, pemerataan dan keadilan. Oleh karena itulah maka Tanah Laut berkemajuan, kampiun, religius, akuntabel, dan terunggul (**BerKaRAkTer**) ditandai dengan:

1. Kokohnya ketahanan dan daya saing ekonomi masyarakat, yang berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, usaha kecil menengah (UKM), usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), industri kecil, dan rumah tangga, perdagangan,

kelautan dan perikanan. Begitu juga dengan industri berat yang pengelolaannya secara berkelanjutan (sustainable), juga dibarengi dengan sikap individu warga Kabupaten Tanah Laut yang senantiasa merasa senang, suka, bahagia, dan bangga sebagai warga Kabupaten Tanah Laut serta cinta kepada Kabupaten Tanah Laut ini.

2. Disisi pemerintahan juga dibarengi dengan semangat pelayanan terbaik, penuh tanggung jawab, bersikap profesional, memiliki keterampilan, baik hard skill maupun soft skill, serta mengembangkan kreasi dan inovasi yang tiada henti.
3. Penyelenggara pemerintahan dan individu mampu memainkan peran yang sinergi dalam posisi dan tanggungjawabnya masing masing.
4. Dalam konteks pembangunan sumberdaya manusia Kabupaten Tanah Laut berkemajuan, kampiun dan terunggul berarti membangun sumberdaya manusia secara integral dan bertahap untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, penuh daya kreasi dan inovasi, berdaya saing tinggi serta memiliki motivasi tinggi untuk senantiasa menjadi yang terbaik. Bukan saja dalam tataran lokal, regional, nasional namun juga dalam tataran global.
5. Nilai - Nilai religiusitas adalah merupakan fondasi kehidupan yang kokoh sekaligus sebagai pilar pembangunan daerah. Oleh karena itu nilai nilai religiusitas harus diyakini, difahami, dijunjung tinggi dan diamalkan serta diterapkan dalam segenap aspek kehidupan oleh setiap insan anggota masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Nilai nilai religiusitas akan membentuk insan masyarakat Tanah Laut yang akhlakul karimah, beriman dan bertaqwa, memiliki kesalehan dan kepedulian sosial serta kecerdasan spiritual yang tinggi . Nilai nilai religiusitas juga akan dijadikan pedoman, sumber inspirasi dan inovasi oleh masyarakat dalam segenap aspek kehidupan baik ekonomi, sosial,

budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), lingkungan, keamanan dan ketertiban serta penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itulah nilai-nilai religiusitas yang termaktub dalam visi 2013-2018 tersebut harus menjadi landasan untuk menuju Tanah Laut berkemajuan, kampiun, religius, akuntabel, dan terunggul (BerKaRAkTer) melalui penciptaan keseimbangan antara dunia dan akherat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta materiil dan spiritual.

### **MISI TANAH LAUT 2013- 2018**

Berdasarkan visi Tanah Laut berkemajuan, kampiun, religius, akuntabel, dan terunggul (BerKaRAkTer) maka untuk pencapaiannya dapat ditetapkan misi daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pengembangan nilai nilai agama dalam praktek bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat.
2. Pengembangan dan penguatan daya saing ekonomi rakyat berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan UKM, UMKM, industri, kearifan lokal, perdagangan dan jasa.
3. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah dan infastruktur wilayah.
5. Pengembangan potensi pariwisata menuju Tanah Laut sebagai daerah tujuan wisata di Kalimantan Selatan yang lebih unggul secara komparatif maupun secara kompetitif.
6. Reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
7. Pengembangan inovasi, tehnologi, budaya, dan kreatifitas daerah.
8. Peningkatan pembinaan generasi muda dan pengembangan kepemimpinan daerah.
9. Peningkatan penyelamatan dan kelestarian lingkungan.

10. Pengentasan kemiskinan.

### **3.7 Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Laut**

#### **3.7.1 Perumusan Visi**

##### **Visi dan Misi Pengembangan Industri Kabupaten Tanah Laut**

Dengan memperhatikan Visi Misi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut, Visi, Misi dan strategi Pembangunan industri nasional, visi misi pembangunan industri Provinsi Kalimantan Selatan, maka Visi Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Laut adalah :

***“MENJADIKAN TANAH LAUT SEBAGAI DAERAH INDUSTRI BERBASIS POTENSI UNGULAN YANG MAJU DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA TAHUN 2037”***

Penjabaran makna dari visi di atas adalah sebagai berikut

#### **Industri**

Seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri, sehingga Kabupaten Tanah Laut berhasil diwujudkan menjadi pusat industri di Kalimantan Selatan berbasis Potensi unggulan daerah, yakni industri berbasis pertanian, kelautan, pertambangan dan pariwisata.

**Maju** mengandung makna:

Bahwa masyarakat pada semua lapisan masyarakat maju dalam aspek industri sehingga tercipta kehidupan ekonomi, kemandirian bekerja dan berusaha untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.

#### **Berdaya Saing**

Daya saing adalah Kapasitas daerah untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional yang dikembangkan dan di kelola dari sektor industri berdasarkan prinsip-prinsip efektifitas dan

efisiensi.

### **Sejahtera**

Suatu kondisi masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan dan pengetahuan, kesehatan dan pendapatan yang tinggi dan merata serta memperoleh rasa aman dan senantiasa menjaga ketertiban, serta adanya pemanfaatan dan pengelolaan berbasis Potensi unggulan daerah, yakni industri berbasis pertanian, kelautan, pertambangan dan pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan adalah masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang baik.

**Tabel 3.2**  
**Keterkaitan Visi Pembangunan Industri Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tanah Laut**

<b>Visi Nasional</b>	<b>Visi Provinsi Kalimantan Selatan</b>	<b>Visi Kabupaten Tanah Laut</b>
<b>Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh</b>	<b>Terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai Wilayah Industri yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Daerah pada Tahun 2037</b>	<b>Industri Berbasis Potensi Unggulan Yang Maju dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Tahun 2037</b>

Sumber: Data di olah, 2017

### **3.7.2 Misi Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Laut**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Kabupaten Tanah Laut mengemban misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia industri yang berkualitas dan berdaya saing untuk mewujudkan masyarakat sejahtera.
2. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bertumpu pada Potensi unggulan dalam pengembangan industri berbasis pertanian, perkebunan,

kelautan, pertambangan, dan pariwisata.

3. Meningkatkan fasilitas infrastruktur pada wilayah Kawasan Industri Prioritas, akses pengembangan pusat pertumbuhan industri dan menciptakan sentra industri yang berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 3.3**  
**Sinkronisasi Rancangan Misi Kabupaten Tanah Laut Dengan Misi Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan**

<b>Nasional</b>	<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>	<b>Kabupaten Tanah Laut</b>
1 Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional	Mempercepat pembangunan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas industri	Meningkatkan fasilitas infrastruktur pada wilayah Kawasan Industri Prioritas, akses pengembangan pusat pertumbuhan industri.
2 Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional	Meningkatkan pengelolaan sumber daya unggulan daerah yang efisien yang mampu mendukung industri komoditas unggulan	peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bertumpu pada Potensi unggulan dalam pengembangan industri berbasis pertanian, perkebunan, kelautan, pertambangan, dan pariwisata.

<b>Nasional</b>	<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>	<b>Kabupaten Tanah Laut</b>
3 Meningkatkan industri . yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau	Meningkatkan industri-industri hilir lanjutan yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk meningkatkan nilai tambah dan kompetensi industri daerah	menciptakan sentra industri yang berwawasan lingkungan.
4 Menjamin kepastian . berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat		Pengembangan produk potensi unggulan daerah
5 Membuka kesempatan . berusaha dan perluasan kesempatan kerja	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing	Mewujudkan sumber daya manusia industri yang berkualitas dan berdaya saing
6 Meningkatkan . persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional		Mewujudkan pemerataan pembangunan industri
7 Meningkatkan . kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan		Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat

Sumber: Data di olah, 2017

### **3.8 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Industri Kabupaten Tanah Laut**

#### **3.8.1 Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Laut**

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Laut adalah:

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang menguasai teknologi, dan keterampilan industri.

2. Mewujudkan industri di daerah yang berbasis Potensi unggulan sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah.
3. Meningkatkan pembangunan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas industri pada kawasan Industri Prioritas, dan wilayah peruntukan industri, dan sentra industri dengan prinsip tata kelola lingkungan yang baik.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri keseluruhan wilayah Kabupaten Tanah Laut, guna menuju kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

### **3.8.2 Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Laut**

Sasaran pembangunan industri Kabupaten Tanah Laut yang dicapai pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2037 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Laut**  
**Tahun 2022 - 2037**

No	Sasaran	Baseline 2017	Tahun			
			2022	2027	2032	2037
1	Pertumbuhan sektor industri (%)	5,88	6,15	7,33	8,25	10,50
2	Kontribusi industri terhadap PDRB (%)	11,39	12,13	13,07	13,81	14,55
3	Nilai produksi industri (Rp ribu)	242.525. 286	255.000. .000	268.000. 000	282.000. 000	296.000. 000
4	Jumlah tenaga kerja sektor industri (orang)	3.251	3.740	4.300	4.950	5.700

Sumber : Data di olah, 2017

Sasaran kuantitatif di atas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut antara 5,5% sampai dengan 6,0 % per tahun;

2. Inflasi 5% sampai dengan 5,5%
3. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
4. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. Kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung pelaksanaan peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
6. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
7. Koordinasi antar kementerian/lembaga/dinas dan peran aktif pemerintah daerah dalam pembangunan industri.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanah Laut tahun 2017 – 2037 tersebut dibutuhkan :

1. Keselarasan visi dan misi (*alignment vision and mission*) antara provinsi dan Kabupaten Tanah Laut;
2. Komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Tanah Laut, masyarakat dan pelaku dunia usaha melalui kepemimpinan Bupati, melalui prinsip-prinsip: kebersamaan (*togetherness*), kemandirian (*self-help*), keadilan dan keberlanjutan (*sustainability*). Ketiga prinsip tersebut diwujudkan melalui pendekatan secara komprehensif, yaitu peningkatan modal sosial (*social capital*), pemberdayaan (*empowerment*), tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), membangun saling kepercayaan (*trust each others*), dan komunikasi yang sehat (*health of communication*);
3. Pelaksanaan pembangunan daerah secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan industri.

### **Tahapan Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Laut**

Tahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut, tahapan dan arah rencana pembangunan industri Kabupaten Tanah Laut yaitu sebagai berikut:

1. Tahap I (2017-2022)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk pembangunan dan peningkatan sektor agro industri berbasis potensi wilayah yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli di bidang industri, percepatan infrastruktur dan fasilitas industri, meningkatkan penguasaan teknologi, terciptanya sentra-sentra industri baru dan pengembangan serta pembinaan sentra-sentra industri yang sudah ada.

2. Tahap II (2022-2027)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai perekonomian daerah yang berdaya saing melalui pembangunan industri hilir berbasis pada sektor pengembangan industri berbasis pertanian, perkebunan, kelautan, pertambangan, dan pariwisata, dan potensi wilayah yang didukung penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta tersedianya SDM yang berkualitas industri.

3. Tahap III (2027-2032)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk peningkatan dan pengembangan sektor industri unggulan berbasis pertanian, perkebunan, kelautan, pertambangan, dan pariwisata melalui sistem inovasi daerah dan teknologi dengan pengembangan industri hulu agro, industri aneka, industri logam dasar, dan pengembangan serta kemitraan IKM sentra industri kerakyatan dengan investor besar.

4. Tahap IV (2032-2037)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan sektor industri di Kabupaten Tanah Laut menjadi Daerah Industri Berbasis Potensi Unggulan Yang Maju dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Tahun 2037, serta berbasis inovasi dan teknologi.